

Perilaku Pemilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Kolaka Utara



Skripsi

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

Oleh:

Cice Verawati R. L.

E 111 04 007

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan

Universitas Hasanuddin

Makassar

2011

Halaman Persetujuan
SKRIPSI
PERILAKU PEMILIH PEREMPUAN PADA PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

oleh:
CICE VERAWATI R.L.
E 111 04 007
Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Skripsi
Pada tanggal, 28 Juli 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. GUSTIANA A. KAMBO , M.Si
NIP. 197308131998032001

SUKRI TAMMA , S.IP, M.Si
NIP. 197508182001 1 008

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Ketua Program Studi Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Dr. MUHAMMAD AL-HAMID , M.Si
NIP. 197109171997031001

Dr. GUSTIANA A. KAMBO , M.Si
NIP. 197308131998032001

Halaman Penerimaan

PERILAKU PEMILIH PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Nama : Cice Verawati R.L.
Nomor Pokok : E 111 04 007
Jurusan : Politik Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Politik

Telah diterima dan disetujui oleh Panitia Ujian Sarjana Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik Jurusan Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, 28 Juli 2011

Panitia Ujian Sarjana

Ketua	: Drs. H.A. Yakub, M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Sukri Tamma, S.IP, M.Si.	(.....)
Anggota	: A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si.	(.....)
	Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.	(.....)
	A. Naharuddin, S.IP, M.Si.	(.....)

ABSTRAKSI

CICE VERA WATI R.L, Nomor Pokok E 111 04 007, dengan judul skripsi “Perilaku Pemilih Perempuan pada Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara”. Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si sebagai konsultan I dan Sukri Tamma, S.IP, M.Si sebagai konsultan II.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran objektif tentang perilaku politik perempuan, dalam hal ini pilihan politik perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik tersebut. Pilihan politik perempuan dimaksudkan sebagai pilihan atau pemberian suara terhadap pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu, pilihan politik mencakup informasi dan pengetahuan seputar pemilihan yang diterima perempuan dan menjadi landasan ketika menggunakan hak pilihnya.

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang melibatkan warga negara biasa atau mengambil keputusan. Dalam hal ini, perempuan sebagai warga negara biasa yang ikut dalam kegiatan yaitu pemilihan calon legislatif. Perempuan yang terlibat dalam hal ini memiliki pilihan-pilihan politik untuk menjatuhkan pilihan politiknya kepada kandidat, ataupun tidak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan informasi dan pemahamannya.

Dalam pembahasan tentang perilaku politik perempuan dalam hal ini pilihan politik perempuan, kerangka konseptual dimasukkan teori pilihan rasional serta pendekatan sosiologis dan psikologis dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan.

Pada pemilihan legislatif di Kolaka Utara tahun 2009, pemilih perempuan memiliki konteks yang berbeda-beda. Tiap perempuan memiliki lingkungan sosial dan proses sosialisasi yang berbeda-beda pula. Dalam sosialisasi lingkungan sosial perempuan, terjadi penyerapan nilai-nilai dan informasi yang diterima. Selain itu tingkat pendidikan sangat berkorelasi dengan akses informasi yang dipengaruhi bangunan pengetahuannya.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penampakan secara jelas dan menganalisa pilihan politik perempuan. Dasar penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara, kondisi tiap perempuan tidaklah sama. Terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan informasi dan rasionalitas. Selain itu terdapat pula perempuan yang menggunakan hak pilihnya tapi memiliki informasi yang sangat minim terhadap pemilihan ini. Pilihan politik perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, proses sosialisasi dan kepentingan juga mempengaruhi pilihan politik perempuan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

- 1. Orangtua tercinta, ayahanda Ta'ba dan ibunda Hj. Mida untuk segala cinta kasih dan perjuangannya selama ini mendukung penulis dalam kehidupan dan pendidikan. Mertua tercinta, Abdullah dan Dg. Lenten atas segala bantuan kepada penulis selama ini. Penulis mohon maaf jikalau selama ini, penulis seringkali menyusahkan kalian semua.*
- 2. Suami tercinta (alm.) Syarifuddin A. untuk dukungan, cinta kasih, dan bantuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Anak tercinta Tasya Sakela Farsana yang selalu mendampingi penulis, memberikan hiburan di kala hati sedih dan susah. Terima kasih ya Allah karena telah memberikan dua hal yang terindah dalam hidup penulis.*
- 3. Pembimbing skripsi Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si dan Sukri Tamma, S.IP, M.Si yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Mohon maaf apabila penulis seringkali melakukan kesalahan dalam pengerjaan skripsi ini.*
- 4. Teman-teman Politik angkatan 2004, terima kasih atas persahabatan yang telah terjalin selama ini. Dukungan dan doa teman-teman sekalian telah membuat penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi.*

5. *Mala yang sudah meminjamkan laptopnya, Tante Imma yang sudah bersedia menampung penulis di kosan, K'Jan yang sudah membantu nge-print skripsi, Pak Abdi atas bantuannya selama ini, K'Iccank yang sudah membantu dalam pengerjaan skripsi ini.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Makassar, 22 Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	14
C. TUJUAN PENELITIAN	14
D. MANFAAT PENELITIAN	15
BAB. II KERANGKA KONSEPTUAL	16
A. PILIHAN POLITIK	16
1. PENDEKATAN SOSIOLOGIS	20
2. PENDEKATAN PSIKOLOGIS	22
B. TEORI PILIHAN RASIONAL	
DALAM MELIHAT PILIHAN POLITIK	23
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
PERILAKU DAN PILIHAN POLITIK PEREMPUAN ...	26
D. PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF	
DI INDONESIA	31
E. KERANGKA PEMIKIRAN	37
BAB. III METODE PENELITIAN	41
A. LOKASI PENELITIAN	41
B. TIPE DAN DASAR PENELITIAN	42
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	42
D. JENIS DATA	43
E. PENENTUAN INFORMAN	44

F. METODE ANALISIS DATA.....	45
BAB. IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	46
A. GAMBARAN SINGKAT KECAMATAN KATOI	
KABUPATEN KOLAKA UTARA	47
B. KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA	48
BAB. V PEMBAHASAN	50
A. PILIHAN POLITIK PEREMPUAN	
PADA PEMILIHAN UMUM 2009	52
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN	
POLITIK PEREMPUAN	61
1. PROSES SOSIALISASI	63
2. KELOMPOK SOSIAL	71
3. KEPENTINGAN	72
BAB.VI PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR NAMA INFORMAN	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi sebagai suatu sistem politik, telah meniscayakan semangat persamaan dan kebersamaan demi pencapaian kebaikan bersama. Dalam suatu kehidupan bernegara dan juga bermasyarakat, dibutuhkan suatu bentuk partisipasi sebagai wujud dari kebersamaan dan keikutsertaan dalam proses politik tersebut. Partisipasi politik pada dasarnya adalah aspek penting dalam negara demokrasi dan juga menjadi penanda adanya modernisasi politik.

Bentuk keikutsertaan, merupakan proses yang melibatkan seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan termasuk melibatkan pihak-pihak dari kelompok sosial manapun. Dalam kelompok-kelompok sosial tersebut terdapat seperangkat norma, nilai dan gagasan yang berlaku dan tersosialisasikan melalui proses yang panjang. Hal inilah yang nantinya berpengaruh terhadap preferensi dan perilaku politik.

Seperti halnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan suatu kelompok sosial yang besar, terbentuknya norma atau aturan-aturan dalam kehidupan kemasyarakatan untuk pencapaian kebaikan bersama adalah kemestian. Pada sistem politik demokrasi yang telah disebutkan sebelumnya, maka kehadiran pemilu yang bebas dan adil adalah suatu keniscayaan pula.

Pada pemilu legislatif 2009, terdapat beberapa hal yang menjadi khas, yakni ruang politik bagi para caleg untuk bertarung menjadi sangat terbuka. Hal ini disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung penentuan pemenang kursi DPR

dan DPRD berdasarkan suara terbanyak, bukan lagi daftar urut partai. UU Pemilu yang menyatakan bahwa kursi dimenangkan berdasarkan nomor urut (kecuali untuk calon yang berhasil meraih 0,3 BPP sendiri) dengan maraknya “kontrak” yang ditandatangani para calon dari partai untuk mundur agar calonnya yang meraih suara terbanyak masuk ke DPR duluan.

Putusan ini juga mendorong sengitnya pertarungan antar calon legislatif. Mengingat calon partai yang menerima suara terbanyak sendirilah yang akan menang kursi partai tersebut, maka dengan meniadakan daftar urut setiap calon berdiri bersama untuk meraih suara. Untuk banyak kasus suara yang harus diraih adalah suara dari rekan se-partai sendiri. Persaingan antara rekan caleg se-partai ini dapat mengurangi jumlah suara yang diterima partai secara keseluruhan jika kampanye menjadi terlalu negatif.

Ketika ruang bertarung menjadi terbuka, maka bagaimana menarik perhatian dan mendapatkan suara pemilih menjadi sesuatu yang signifikan. Karenanya mengenal perilaku dan konstruk sosio kultur pemilih adalah hal yang pasti jika ingin memenangkan pertarungan. Siapapun calegnya dan darimanapun partainya, akan membidik segmen dimana jumlah pemilihnya banyak dengan segregasi kekuatan yang memperebutkan suara yang tidak begitu ketat. Sayangnya, banyak caleg kurang memperhatikan faktor demografis dari konstituennya dalam menentukan segmen mana yang akan mereka bidik sebagai calon pemilihnya, sehingga kebanyakan mereka kesulitan untuk memformulasi target, isu, hingga janji kampanye yang mumpuni untuk memperoleh perhatian calon pemilih.

Tidak banyak caleg maupun partai yang memperhatikan segmen pemilih perempuan. Padahal jika kita bandingkan secara kuantitatif, pemilih perempuan lebih

besar dari pemilih laki-laki, tidak jarang perbandingan jumlah menjadi begitu jomplang ketika unit analisa kita turunkan menjadi unit pemilihan terendah. Seperti yang terjadi pada wilayah dimana penulis melakukan penelitian ini, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan data DPT Pemilu Legislatif tahun 2009 terdapat 1931 (48,21%) pemilih Laki-Laki dan 2074 (51,78%) pemilih perempuan. Lebih dari setengah dari total jumlah pemilih di kecamatan itu adalah pemilih perempuan. Jumlah tersebut adalah sebuah segmen pemilih yang signifikan yang jika dapat dipahami pola perilaku memilihnya, maka bukan hal yang mustahil suara itu akan mengantarkan salah seorang atau kandidat menuju kursi dewan.

Ada anggapan bahwa, besarnya jumlah pemilih perempuan seharusnya linier dengan keterwakilan perempuan di dewan legislatif. Terdapat beberapa argumen mengapa hal tersebut menjadi signifikan; 1) Argumen Keadilan, argumen ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Argumen tersebut menyatakan bahwa sangatlah tidak adil jika kaum laki-laki memonopoli perwakilan, terutama suatu negara yang menganggap diri sebagai Negara Demokrasi Moderen. Anne Philips mengatakan : tidak ada argumen yang bertolak dari keadilan dapat mempertahankan keadaan seperti sekarang ini; dan tidak ada argumen keadilan untuk kesamaan antara perempuan dan laki-laki. Argumen – argumen tambahan mengenai kodrat perwakilan dapat mengaburkan inti pokok itu, tetapi argumen-argumen tambahan itu tidak pernah dapat membalikkannya. Argumen keadilan juga didukung oleh klaim-klaim kewargaan. Kewargaan merupakan sekumpulan hak, kewajiban, seseorang dalam sistem politik. Dalam istilah-istilah konstitusional, perempuan secara formal mempunyai kewargaan yang sama dengan laki-laki dalam sistem

demokratis. Namun demikian, cara tatanan-tatanan kelembagaan merumuskan kewargaan dapat memiliki pengaruh berbeda pada perempuan dan laki-laki¹.

Kemudian argumen ke 2) adalah argumen *pragmatis*. Argumen ini memanfaatkan gagasan mengenai peran politisi rasional yang memaksimalkan jumlah suara. Hal ini didasarkan pada keuntungan-keuntungan partai-partai politik untuk meningkatkan jumlah wakil perempuan mereka. Para pendukung menyoroti pentingnya memilih perempuan terkait dengan suksesnya pemilihan. Misalnya, para pendukung kesetaraan seks Inggris menunjuk pada kesenjangan gender yang sudah lama terjadi dalam pemilihan dimana kaum perempuan lebih cenderung memberikan suaranya pada partai konservatif daripada laki-laki. Perbedaan gender tradisional memberi sukses pemilihan yang tidak seimbang kepada partai konservatif, yang mendominasi pemerintahan selama abad ke 20. Seandainya kaum perempuan memilih dengan cara yang sama seperti kaum laki-laki tidak akan ada pemerintahan konservatif antara tahun 1945 dan 1979².

Para pendukung argumen pragmatis mengajukan klaim bahwa perempuan lebih cenderung memberikan suaranya pada partai-partai yang memilih kandidat perempuan. Mereka memanfaatkan argumen-argumen perbedaan untuk mempertahankan bahwa perempuan memiliki, dan tahu mereka memiliki, pengalaman-pengalaman dan kepentingan khusus yang hanya dapat dimengerti dan diwakili oleh perempuan. Mereka berpendapat bahwa gambaran partai maskulin bersifat ketinggalan zaman dan tidak menarik bagi para memilih perempuan. Menurut logika ini, meningkatnya perwakilan perempuan akhir-akhir ini akan mengarahkan ke proses persaingan penawaran bagi

¹ Joni Lovendowski, *Politik Berparas Perempuan*, Hal. 48-49

² *Ibid*, Hal.49

dukungan perempuan yang menyebabkan partai manapun tidak dapat tinggal diam kalau berharap sukses dalam pemilihan³.

Argumen ini membuat keutamaan yang lain dengan berpendapat bahwa melalui keterlibatan perempuan, politik akan menjadi lebih konstruktif dan ramah. Ini tentu saja merupakan klaim kontroversial, tetapi memiliki dasar tertentu. Perbedaan gender dihubungkan dengan gaya komunikasi dan pembuatan keputusan yang berbeda⁴.

Di Indonesia, pada kerangka persamaan keterwakilan tersebut, baik pada undang No. 2 Tahun 2008 tentang parpol, telah ditetapkan bahwa, keterwakilan perempuan dalam bursa caleg tiap partai harus memenuhi kuota 30%⁵. Hal ini berarti 1 dari 3 calon legislatif dari sebuah partai adalah calon legislatif perempuan. Meski demikian, dalam Pemilu-pemilu sebelumnya, meski terdapat peraturan tentang kuota perempuan 30% akan tetapi aturan tersebut menjadi tidak berdampak signifikan dengan masih berlakunya sistem nomor urut dalam penentuan calon legislatif yang terpilih.

Meski telah berlaku kuota 30%, dengan asumsi dan argumen persamaan keterwakilan gender di lembaga legislatif, tetap hasil Pemilu 2009 memperlihatkan rendahnya tingkat keterwakilan perempuan, apalagi di lembaga-lembaga legislatif tingkat daerah/kabupaten. Pada pemilu 2004, argumen yang mungkin terkait dengan hal ini adalah karena berlakunya sistem nomor urut dalam penentuan caleg terpilih, dimana keterwakilan perempuan dalam daftar caleg partai selalu ditempatkan pada nomor urut sepatu (nomor urut paling bawah) sehingga kerja-kerja politik dan dukungan pemilih (perempuan) terhadap figur caleg perempuan hanya akan menjadi dukungan kosong, dimana keterwakilan mereka pastinya akan diserahkan pada pemilik nomor urut di

³ Ibid, Hal.50

⁴ Ibid

⁵ Lihat Undang-Undang No.2 Tahun 2008

atasnya, calon legislatif perempuan hanya dimanfaatkan sebagai pengumpul suara (vote gathers) untuk mengakumulasi suara bagi partai, dimana nomor-nomor urut awal didominasi oleh calon-calon legislatif laki-laki.

Namun, di saat Pemilu 2009 berlangsung, meski menunjukkan trend peningkatan, tetap saja keterpilihan calon legislatif perempuan untuk mewakili perempuan di legislatif tetap juga rendah jika kita berada pada asumsi mengenai argument-argumen keterwakilan tersebut diatas, apalagi jika katikan juga hal ini dengan besarnya jumlah perempuan terutama di daerah kasus dimana penelitian ini dilakukan . Hal ini berarti bahwa asumsi tentang nomor urut menjadi alasan terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif menjadi tidak berlaku.

Fenomena ini membawa kita pada sebuah pertanyaan substantif seperti ini – mengapa kesetaraan perwakilan perempuan penting. Jawabannya tentunya bukan sekedar pada sejauhmana elektabilitas caleg-caleg (elit / politisi) perempuan dimata pemilih, khususnya pemilih perempuan sendiri, namun pada pusat pertanyaan itu terdapat permasalahan mengenai apakah kaum perempuan membutuhkan perempuan untuk mewakili mereka.

Belakangan ini terdapat anggapan bahwa kaum perempuan telah diwakili secara memadai oleh laki-laki sebagai kepala keluarga dan pengertian bahwa perempuan mungkin mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda dari keluarga mereka umumnya tidak dipertimbangkan. Namun dengan pola-pola sosial yang telah berubah, menjadi lebih mudahlah untuk menyepakati bahwa kaum perempuan mempunyai hak-hak sebagai warga negara yang memberi mereka kemungkinan untuk berpartisipasi

dalam pemerintahan, dimana kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipertahankan dan dikembangkan.

Diakui atau tidak kaum perempuan di Indonesia, terutama mereka-mereka yang bertarung dalam pencalonan legislatif baik di daerah maupun pusat pada Pemilu 2009 lalu, tengah berada pada dua arus utama pemikiran tentang keterwakilan perempuan. Pada satu sisi, perubahan pola sosial, terutama keterpinggiran kaum perempuan dalam keputusan maupun kebijakan publik terkait dalam berbagai hal terutama menyangkut perempuan sendiri tidak cukup dirasa hanya dengan keterwakilan perempuan oleh laki-laki di dewan legislatif. Mungkin juga benar asumsi yang menyatakan bahwa hanya perempuan yang mengerti perempuan. Namun pula menjadi pertanyaan, apakah pemilih perempuan mengerti apa yang diinginkan oleh caleg perempuan terhadap mereka. Ataupun para caleg perempuan yang tak mampu meyakinkan para pemilih perempuan tentang kepentingan perempuan. Tentunya, untuk melihat bagaimana pilihan perempuan, kita harus memilikinya dalam kerangka kebersamaan dan kesetaraan dalam kesempatan politik yang disediakan oleh mekanisme demokratis pada pemilu 2009.

Dengan semangat kebersamaan dan kesetaraan tersebut, semestinya menjadikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Tapi sebuah penelitian pernah dibuat disekelompok negara untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan, masih banyaknya hambatan dan kendala dikalangan internal perempuan sendiri⁶.

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, keikutsertaan seseorang dalam hal ini

⁶ Azza Karam, 1999

dapat sebagai warga negara biasa maupun sebagai pengambil keputusan⁷. Perempuan sebagai warga negara biasa dalam hal ini, terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yaitu Pemilihan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009 di Kecamatan Kato. Keterlibatan tersebut berupa keikutsertaan dalam menjangkau pilihan politiknya.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan perilaku politik perempuan pada pilihan-pilihan politik perempuan dalam Pemilu Tahun 2009 di Kecamatan Kato Kabupaten Kolaka Utara, yaitu pada kandidat/caleg mana pilih perempuan menjangkau pilihannya. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri hal-hal yang mendasari dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan tersebut. Perempuan sebagai warga negara berhak untuk ikut dan berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum.

Setiap individu dalam masyarakat, memiliki latar belakang dan konteks yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat kondisi masyarakat heterogen, dan bervariasi. Mulai dari kondisi sosial, ekonomi, psikologi, dan budaya. Terdapat pula kelompok – kelompok kategorial dalam masyarakat, seperti jenis kelamin, perbedaan usia dan perbedaan pendidikan. Hal-hal ini yang mempengaruhi perilaku politik pada momen politik nantinya, sebab hal-hal yang melatarbelakangi ini akan berimplikasi pada bangunan pengetahuan dan preferensinya kemudian.

Dalam konteks negara yang meniscayakan pemilihan umum secara langsung, maka faktor heterogenitas merupakan suatu komponen yang perlu diperhatikan dan juga suatu kajian yang menarik. Terdapat faktor geografis, demografi, sosial masyarakat dan juga kondisi masyarakat secara kategorial. Pada pemilihan umum secara langsung, selain

⁷ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1992, Hal. 131

dihadapkan oleh faktor sosial, terdapat pula kondisi atau pengkategorian masyarakat yang sangat besar dalam hal kuantitas. Sistem yang ada, mensyaratkan perolehan suara terbanyak dari suatu proses pemilihan sebagai bentuk legitimasi masyarakat. Studi tentang faktor jenis kelamin sebagai bentuk pengkategorian yang berpengaruh pada perilaku memilih, sangat penting dilakukan. Kenyataannya, jumlah kaum wanita lebih dari lima puluh persen dari total populasi yang merupakan proporsi yang menentukan hasil pemilu⁸

Jika keikutsertaan dalam pemilihan umum secara langsung dapat berupa tindakan-tindakan dan juga hadirnya persepsi-persepsi, maka hal itu akan berujung pada pola perilaku yang disertai sikap-sikap terhadap objek-objek politik. Kehadiran persepsi-persepsi dan bangunan pengetahuan seseorang baik laki-laki dan perempuan yang dibedakan secara kelompok kategorial yang besar – tidaklah berupa sesuatu yang jatuh dari langit, tapi seperti yang disinggung sebelumnya bahwa terdapat konteks yang melatarbelakanginya. Pada kajian-kajian tentang perempuan, terdapat konteks historis dan sosial yang cukup kompleks tentang posisi perempuan. Dalam kultur masyarakat Indonesia terdapat anggapan bahwa perempuan adalah mahluk nomor dua. Seperti yang diungkapkan Mansor Fakih dalam buku analisis gender dan transformasi sosial⁹, bahwa terdapat anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin – berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Hal ini kemudian diperkuat oleh penafsiran terhadap agama, keyakinan tradisi, sampai pada kebijakan pemerintah dan juga asumsi ilmu pengetahuan.

⁸ Adman Nursal, *Political Marketing; Strategi Memenangkan Pemilu*, Jakarta, 2004, Hal. 88

⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, 1996, Hal. 15

Inilah yang menjadi salah satu hal yang melatar belakangi sikap dan kondisi perempuan, sekaligus sebagai pihak yang terlibat dalam kehidupan politik baik secara langsung dan tidak langsung, dan juga bagian kategorial yang besar dalam jumlah kuantitas. Partisipasi atau proses keterlibatan dalam kehidupan politik dapat dilihat dari berbagai sisi, terdapat bentuk partisipasi yang aktif dan pasif¹⁰.

Bentuk partisipasi yang aktif dan pasif ini tergantung pada tingkat informasi yang diperoleh. Seperti yang diungkapkan lebih lanjut oleh Surbakti terdapat cara dalam mendeskripsikan hasil kajian mengenai perempuan dalam politik yaitu pola khusus partisipasi politik perempuan yang pada umumnya berbentuk kendala, seperti sosialisasi politik yang berbeda (dengan pria) karakteristik biologik, akses yang tak sama terhadap sumberdaya khususnya bidang pendidikan, profesi dan keuangan¹¹.

Dengan penjelasan tersebut, maka dalam suatu momen politik seperti pemilihan umum yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memberikan hak suaranya secara bebas, dan hal itu tidak terkecuali pada perempuan. Tetapi realitas yang ada, tidak seluruhnya perempuan dapat memberikan hak suaranya secara bebas dan konsisten terhadap pilihan-pilihan politiknya. hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpahaman perempuan dan juga konstruk sosial yang menempatkan perempuan pada posisi seperti itu. Misalnya dalam kehidupan keluarga, seorang isteri atau anak perempuan harus mengikuti pilihan politik suami atau ayah mereka sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Dengan fakta dan realitas yang diuraikan sebelumnya, mengindikasikan bahwa pilihan-pilihan politik perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain itu perempuan

¹⁰ Ibid, Hal.142

¹¹ Ibid, Hal. 2

masih memiliki hambatan dan kendala dikalangan internal perempuan. Hal ini memunculkan ketertarikan penulis dalam menelaah lebih jauh pola perilaku politik perempuan pada pemilihan Umum Di Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara. Fokusnya diarahkan pada pengamatan perilaku politik dan pilihan politik perempuan pada pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara di Kecamatan Katoi, dengan berbagai variable sosial yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diarahkan untuk menemukan secara jelas faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan.

B. Rumusan Masalah

Cakupan yang cukup luas dari penelitian ini, dapat difokuskan dengan memperkecil wilayahnya. Maka peneliti membatasi pertanyaan yang akan dijawab yaitu:

1. Bagaimana pilihan politik perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan politik perempuan pada Pemilihan Umum tahun 2009 di Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menggambarkan pilihan politik perempuan pada pemilihan umum tahun 2009.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan pada pemilihan umum tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya literatur-literatur ilmu politik yang telah ada, khususnya tentang perilaku politik perempuan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang perilaku politik perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, seperti dalam menyusun suatu kebijaksanaan, bagi pemerhati perempuan, dan juga partai politik.
- b. Sebagai bahan rujukan kepada masyarakat, pelaku-pelaku politik dan tentunya para perempuan. Diharapkan, dari penelitian ini semua elemen yang ada dalam masyarakat dapat mengetahui tentang perilaku politik perempuan dan adanya kesempatan yang sama sebagai warga negara.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam Bab ini, dibahas konsep-konsep penting yang relevan dengan judul atau rumusan masalah yang diteliti. Diantaranya; konsep perilaku, konsep Pemilu langsung, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik perempuan, dan juga teori pilihan rasional dan teori feminis. Pada bagian ini dibahas lebih dalam tentang pilihan politik perempuan yang merupakan cakupan dari perilaku politik, dan hal-hal yang mendasari pilihan politik perempuan.

A. Pilihan politik

Masyarakat adalah kumpulan individu-individu, tinggal dan menetap dalam satu wilayah yang sama dan saling berinteraksi. Setiap manusia dalam komunitas masyarakat memiliki karakter, keinginan dan tujuan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat pola-pola interaksi dan bentuk pengorganisasian hubungan-hubungan antara anggota masyarakat. Mulai dari cara mencapai tujuan, kesepakatan dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Interaksi yang terjalin dengan berbagai pola-polanya yang didasarkan pada orientasi akan kepentingan dan juga tujuan akan melahirkan berbagai pola perilaku berdasarkan orientasi dan konteks masyarakat. secara umum pola perilaku ini dapat berupa perilaku ekonomi, perilaku budaya, keagamaan dan perilaku politik ¹².

Perempuan dalam suatu masyarakat akan berinteraksi dan berada dalam konteks lingkungan yang mencakup orientasi-orientasinya. Orientasi itu didasarkan pada keinginan, karakter dan tujuan-tujuannya. inilah yang kemudian membentuk pilihan-pilihan politik yang akan terpola dalam waktu yang lama, ataupun secara temporer dapat berlaku tergantung pada

¹² Sudijono S. Perilaku Politik, 1995, Hal. 3

sejauh mana seseorang maupun lembaga politik mampu menerjemahkan menerima dan menerjemahkan kepentingan-kepentingan mereka.

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu¹³. Dari bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik, terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai, terdapat berbagai keinginan, cara dan juga pilihan-pilihan yang dihadapkan dalam suatu sistem politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pilihan politik merupakan faktor-faktor yang menentukan alternatif keputusan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat¹⁴.

Pemilihan Umum tahun 2009 yang berlangsung di Kabupaten Kolaka Utara , khususnya di Kecamatan Katoi merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Warga negara yang terlibat maupun ikut berpartisipasi pada dasarnya terlibat dalam suatu perilaku politik. Perempuan yang dalam hal ini sebagai warga negara juga ikut dalam pemilihan umum anggota legislatif, yang merupakan suatu proses pelaksanaan dan pembuatan keputusan yang melibatkan perempuan. Dalam proses ini perempuan memiliki pilihan-pilihan politik yang didasarkan pada berbagai hal.

Berbicara tentang pilihan politik, beberapa hal perlu untuk diperhatikan, seperti halnya sikap politik dan partisipasi politik. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi baru merupakan kecenderungan atau predisposisi¹⁵. Sikap adalah bentuk dari pemahaman yang muncul tentang realitas yang ada, dengan menggunakan preferensi dan bangunan pengetahuan yang ada. Sedangkan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa

¹³ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 1991, Hal. 8

¹⁴ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1992, Hal. 131

¹⁵ Sudijono S, Perilaku Politik, 1995, Hal. 4

dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya¹⁶. Sikap belum tentu adalah partisipasi, tapi partisipasi adalah sikap politik. Diam dalam artian tidak ikut dalam suatu kegiatan politik atau tidak berpartisipasi, merupakan suatu sikap politik.

Sikap politik dan juga pilihan politik, diawali oleh terbentuknya persepsi. Persepsi ini terbentuk dari hasil interaksi antara stimulus politik dengan kesadaran kognitif atau alam pikiran seseorang¹⁷. Hal ini nantinya akan mempengaruhi sikap, aspirasi, perilaku politik dan juga pilihan politik.

Pilihan politik seseorang dapat dilatarbelakangi oleh banyak hal, setiap orang memiliki pertimbangan dan alasan untuk menjatuhkan sebuah pilihan politik terhadap objek-objek politik yang mereka hadapi. Mulai dari unsur kepentingan yang dimungkinkan dapat terakomodasi, pengaruh sosial politik yang ada di sekitar termasuk peristiwa-peristiwa dan media massa, dan juga orientasi primordialisme dan sebagainya.

Pada Pemilu 2009 sebagai Pemilu yang dianggap merupakan Pemilu paling deliberatif, bagi partai politik ataupun para politisi dalam menjaring dukungan pemilih perempuan bukan hal yang mudah. Penggalangan kekuatan massa, memperbanyak caleg perempuan, atau menjual prestasi dan kinerja bukanlah pertimbangan utama. Namun, pandangan keagamaan serta pengaruh keluarga merupakan dua hal yang paling memengaruhi pilihan politik perempuan.

Sebuah survey menjelang Pemilu 2009 dilakukan oleh Litbang Kompas. Survei memperlihatkan bahwa perempuan memiliki pertimbangan yang unik dalam menentukan sikap politik. Berdasarkan survei, responden perempuan lebih mempertimbangkan faktor keagamaan dalam pilihan politik daripada responden laki-laki. Sekitar sepertiga responden perempuan menyatakan bahwa pandangan keagamaan atau keberadaan tokoh agama dalam suatu parpol

¹⁶ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1992, Hal. 140

¹⁷ Adman Nursal, Political Marketing; Strategi Memenangkan Pemilu, 2004, Hal. 27

menjadi pertimbangannya dalam menentukan pilihan. disamping itu, Wajah domestik pun masih membayangi sikap politik perempuan. Alih-alih mandiri, pilihan politik perempuan masih dipengaruhi oleh pilihan politik keluarga. Berdasarkan survei, setiap 10 responden perempuan, tiga di antaranya menyatakan informasi keluarga berpengaruh pada pilihan politiknya.

Dari uraian tersebut. Dapat kita uraikan beberapa hal yang mempengaruhi pilihan politik perempuan, kita dapat mengambilnya dari beberapa pendekatan dalam perilaku politik yang biasa digunakan untuk melihat bagaimana pilihan-pilihan politik terbangun, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis.

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini biasa juga disebut dengan mazhab Columbia. Cikal bakalnya berasal dari Eropa, model ini kemudian dikembangkan oleh para sosiolog Amerika Serikat yang mempunyai latar belakang Eropa, khususnya di Universitas Columbia, menurut mazhab ini pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial – usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya – memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan pilihan-pilihan politik¹⁸.

Interaksi yang terjadi didalam kelompok-kelompok sosial seperti usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan dan sebagainya akan menjadi susunan bangunan pengetahuan yang akan mempengaruhi preferensi politik dan perilaku memilih seseorang hingga kemudian akan mempengaruhi bentuk-bentuk pilihan politiknya. Setiap orang akan mengidentifikasi diri sebagai anggota dari kelompok sosial dimana dia berada. Hal itu akan membuat seseorang menjatuhkan pilihannya berdasarkan orientasi berdasarkan konteks kelompok sosialnya.

¹⁸ Adman Nursal, Political Marketing; Strategi Memenangkan Pemilu, 2004, Hal. 55

Bonne dan Ranney membagi tiga tipe utama pengelompokan sosial¹⁹

- a. Kelompok Kategorial yang terdiri dari orang-orang yang memiliki satu atau beberapa karakter khas, tapi tidak mengorganisasikan aktifitas politik dan tidak menyadari identifikasi dan tujuan kelompoknya. Pengelompokan kategorial terbentuk berdasarkan perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, perbedaan pendidikan.
- b. Kelompok Sekunder yang terdiri dari orang-orang yang memiliki ciri yang sama yang menyadari tujuan dan identifikasi kelompoknya, dan bahkan sebagian membentuk organisasi untuk memajukan kepentingan kelompoknya. Kelompok sekunder mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan kelompok kategorial. Kelompok-kelompok kategorial dapat diklasifikasikan seperti : pekerjaan, status sosio ekonomi dan kelas sosial, dan kelompok-kelompok etnis yang meliputi ras, agama dan daerah asal.

c. Kelompok Primer

Kelompok primer terdiri dari orang-orang yang sering dan secara teratur melakukan kontak dan interaksi langsung. Kelompok primer memiliki pengaruh yang paling kuat dan langsung terhadap perilaku politik seseorang. Yang termasuk dalam kelompok primer adalah, pasangan-pasangan suami isteri, orang tua dan anak-anak, kelompok bermain.

Pendekatan sosiologis melihat bahwa dalam kelompok-kelompok sosial, terdapat kognisi sosial tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku dan pilihan tertentu. Dalam kelompok-kelompok sosial, berlangsung proses sosialisasi. Lingkungan sosial memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma dalam masyarakat, serta memberikan pengalaman hidup²⁰. Proses ini berlangsung dalam waktu yang lama.

¹⁹ Ibid, Hal. 56

²⁰ Sudijono, perilaku Politik, 1995, Hal. 15

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini biasa juga disebut sebagai mazhab Michigan dan pelopor utama mazhab ini adalah August Campbell. Munculnya pendekatan ini merupakan reaksi atas ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis²¹. Pendekatan sosiologis dianggap sulit diukur, tidak jelasnya indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama dan sebagainya merupakan suatu hal yang sulit diukur. Disamping itu secara materi, diungkapkan bahwa variabel-variabel sosiologis seperti kelompok primer dan sekunder, memberi pengaruh pada perilaku memilih dan pilihan politik. Tidakkah variabel-variabel itu dapat dihubungkan dengan perilaku memilih dan pilihan politik jika ada proses sosialisasi. Oleh sebab itu, dalam pendekatan ini, sosialisasilah yang menentukan perilaku memilih dan orientasi pada pilihan-pilihan politik seseorang bukan karakteristik sosiologis²².

Dalam pendekatan ini, sikaplah yang paling menentukan dan hal itu berawal dari informasi-informasi yang diterima seseorang. Menurut Asfar, sikap tidaklah terjadi secara begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang, yang dimulai dari kanak-kanak saat seseorang pertama kali mendapat pengaruh politik dari orang tua atau kerabat dekat²³.

Seperti yang diungkapkan oleh Nursal dan Asfar sebelumnya, bahwa proses sosialisasi yang panjang, akan membuat seseorang untuk membentuk ikatan yang kuat dengan kelompok sosial ataupun organisasi kemasyarakatan. Sehingga hal ini akan menjadi menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan politiknya kelak. Pemilih perempuan yang berada didalam suatu kelompok sosial tertentu akan menerima proses internalisasi berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial tersebut, perilakunya secara umum akan berkaitan dengan

²¹ M. Asfar, *Pemilu dan Perilaku Pemili*, 2006, Hal. 141

²² Ibid, Hal. 141

²³ Adman Nursal, *Political Marketing; Strategi Memenangkan Pemilu*, 2004, Hal. 60

nilai dan kebiasaan yang secara psikologis sangat mempengaruhi perempuan. Begitupun dengan pilihan politiknya yang secara psikologis akan berkaitan dengan preferensi politik anggota kelompoknya.

B. Teori pilihan rasional dalam melihat pilihan politik

Berbagai pendekatan sebelumnya telah menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku politik, dalam hal ini pilihan politik perempuan dan juga berbagai penjelasan tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi pilihan politik perempuan.

Teori pilihan rasional adalah penjelasan yang mendasar dalam melihat perilaku politik perempuan yang mencakup pilihan-pilihan politik dan berbagai hal yang mempengaruhinya. Sosiologi Perilaku memusatkan perhatian pada hubungan antara pengaruh perilaku seorang aktor terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap perilaku aktor²⁴.

Dalam penjelasan Ritzer & Goodman, antara perilaku aktor yakni individu dan lingkungannya, akan terjadi proses yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya dari satu Pemilu ke Pemilu lainnya dan peristiwa-peristiwa politik tertentu bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Dari penjelasan Ritzer dan Goodman tentang hubungan antara perilaku individu yang berkaitan dengan lingkungan, tampak jelas dalam penjelasan Nursal tentang pilihan politik perempuan yang cenderung berubah-ubah pada setiap pemilihan umum. Peristiwa-peristiwa politik tertentu yang diuraikan oleh Nursal merupakan lingkungan yang ada di sekitar aktor yang mempengaruhi pilihan politik individu.

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor, yang dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud, artinya aktor mempunyai tujuan dan

²⁴ George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, 2003, Hal. 356

tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu²⁵. Perempuan sebagai aktor atau individu juga memiliki tujuan dan maksud, dan tindakannya tertuju pada tujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks pemilihan umum dalam hal ini pemilihan umum anggota legislatif perempuan sebagai warga negara dan sebagai individu dalam masyarakat tentunya memiliki tujuan dan maksud dalam momen politik pemilihan umum anggota legislatif. Tindakan-tindakan perempuan sebagai individu merupakan upaya untuk mencapai hal-hal yang dimaksudkan secara rasional dalam proses pelaksanaan pemilihan umum.

Teori pilihan rasional tak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan tindakan pilihan aktor²⁶. Penjelasan tentang pilihan rasional seperti yang diungkapkan oleh Ritzer dan Goodman, merupakan penjelasan tentang letak rasionalitas dalam menjatuhkan pilihan yang pada dasarnya bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Tidak dititikberatkan pada sumber pilihan tapi didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai.

Perempuan sebagai individu dalam proses pemilihan umum anggota legislatif memiliki pilihan rasional yang didasarkan pada upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak menitikberatkan pada sumber-sumber pilihan. Lebih lanjut diungkapkan oleh James S. Coleman, dalam teori pilihan rasional dengan gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan²⁷. Coleman juga menitik beratkan pada tindakan perseorangan yang juga mengarah pada suatu tujuan tertentu yang mengaitkan nilai dalam hal ini adalah pilihan dan juga preferensi. Pilihan

²⁵ Ibid, Hal. 357

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid, Hal. 394

yang didasarkan pada preferensi akan melibatkan berbagai informasi dalam suatu lingkungan sosial.

Friedmen dan Hechter mengemukakan dua gagasan lain yang menjadi dasar teori pilihan rasional; pertama, adalah kumpulan mekanisme atau proses yang menggabungkan tindakan aktor individual yang terpisah untuk menghasilkan akibat sosial, yang kedua adalah bertambahnya pengertian tentang pentingnya informasi dalam membuat pilihan rasional²⁸. Informasi yang dimiliki oleh individu akan dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas dari informasi tersebut dan hal ini nantinya akan mempengaruhi pilihan rasionalnya.

Pilihan rasional perempuan juga didasarkan pada informasi yang dia terima dan dijadikan sebagai preferensi seperti yang di ungkapakan oleh Coleman sebelumnya. Dalam pemilihan umum anggota legislatif, perempuan adalah sebagai individu yang memiliki pilihan yang didasarkan pada rasionalitas dalam memilih. Rasionalitas dalam menjatuhkan pilihannya didasarkan pada maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemilih perempuan dan dikaitkan dengan informasi dan preferensi yang dimilikinya.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku dan Pilihan politik Perempuan

Perilaku politik dan pilihan merupakan adalah sebuah konstruksi sosial, sehingga untuk memahaminya diperlukan dukungan konsep dari berbagai disiplin ilmu²⁹. Dalam menganalisis hal tersebut, maka banyak variabel yang perlu diperhatikan dalam konteks sosial yang sangat dinamis. Mulai dari variabel ekonomi, psikologi sosial, konsep sosiologis geopolitik dan sebagainya. Berbagai disiplin ilmu atau berbagai variabel digunakan secara menyeluruh dan integral.

²⁸ Ibid, Hal. 358

²⁹ Sudijono S., Perilaku Politik, 1995, Hal. 12

Sebagai manifestasi sikap politik, pilihan politik tidak dapat dipisahkan dari budaya politik yang oleh Almond dan Verba diartikan sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara didalam sistem itu³⁰.

Almond menyebutkan bahwa, tiap sistem politik mewujudkan dirinya di dalam pola orientasi-orientasi dan tindakan-tindakan politik tertentu. Dia menyebut pola-pola orientasi-orientasi ini sebagai kebudayaan politik³¹. Seseorang dalam suatu komunitas masyarakat akan dihadapkan oleh nilai dan norma yang diterima sebagai suatu kemestian. Hal inilah yang mempengaruhi pola perilaku seseorang beserta orientasi-orientasi terhadap objek-objek yang ada, dan seperti yang disebutkan oleh Almond, bahwa pola-pola orientasi terhadap objek-objek politik, merupakan wujud dari kebudayaan politik suatu komunitas masyarakat.

Dalam suatu masyarakat terdapat suatu nilai-nilai yang dianut sebagai suatu kesatuan pola bertindak, berpikir dan merasakan. Inilah yang disebut sebagai budaya masyarakat secara keseluruhan. Sejumlah elemen kebudayaan dianut dan mempengaruhi perilaku seluruh anggota masyarakat, sementara sejumlah elemen kebudayaan yang lain, meskipun dianggap memiliki salienasi yang tinggi oleh para penganutnya, hanya berlaku di kalangan anggota kelompok yang sangat terbatas, dalam artian inilah para ahli membedakan pengertian kebudayaan dari sub kebudayaan³².

Dari uraian diatas, dapat di katakan bahwa terdapat suatu nilai yang berlaku secara menyeluruh, tapi terdapat pula nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu, dan itu biasanya tidak berlaku bagi kelompok masyarakat lain. Seperti halnya pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya tentang perilaku memilih, itu bersumber dari penelitian yang

³⁰ Ibid, Hal. 12

³¹ Ibid, Hal. 74

³² Ibid, Hal. 70

diadakan di negara-negara maju, pemilu yang berulang-ulang dan praktek demokrasi yang relatif bersih, memungkinkan teori itu memiliki validitas tinggi untuk memprediksi perilaku pemilih untuk pemilu-pemilu berikutnya³³.

Untuk konteks Indonesia, terdapat perbedaan antara masa orde baru dan pasca orde baru, seperti iklim sosial politik yang berbeda antara kedua masa tersebut. Tapi bukan berarti hasil kajian pada masa sebelumnya sama sekali tidak bisa digunakan, mengingat hasil penelitian pada masa reformasi masih sangat terbatas. Berikut ini diuraikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perilaku memilih yang merupakan hasil kajian dan penelitian pada masa silam yang diperkaya dengan kajian masa kini.

Diantara beberapa jenis pengelompokan sosial, agama merupakan salah satu faktor penting pembentukan perilaku memilih di Indonesia, sejumlah penelitian menunjukkan, agama pemilih memiliki korelasi nyata dengan perilaku memilih. Setiap orang yang mengaku beragama, akan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok agamanya dan pilihan politiknya biasanya disejalkan dengan agama yang dianutnya.

Studi tentang besarnya pengaruh agama, bisa saja menjadi hal yang kurang relevan lagi untuk masa sekarang ini. Tapi beberapa rujukan lain justru memperkuat bahwa agama menjadi variabel penting dalam membentuk perilaku memilih. Eep Saefullah Fatah mengungkapkan di harian Kompas pada 4 Desember 1998, bahwa segmen pemilih primordial merupakan pemilih yang cukup besar dalam pemilu mendatang, mereka terkait dengan simbol-simbol primordial yang identik dengan mereka.

Untuk konteks Indonesia, hal ini bukan merupakan suatu hal yang baru, sebab budaya primordialisme tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu, apalagi sistem yang memberikan otonomi kepada setiap daerah untuk memilih langsung kepala daerahnya sendiri –

³³ Adman Nursal, Political Marketing; Strategi Memenangkan Pemilu, 2004, Hal. 77

semakin membuka peluang untuk masyarakat memilih sesuai dengan keinginannya, dan seperti yang dikatakan oleh Eep Saefullah Fatah bahwa, masyarakat akan terkait dengan simbol-simbol primordial yang identik dengan mereka.

Selain orientasi agama, terdapat faktor sosial yang perlu mendapat perhatian yaitu usia dan jenis kelamin. Studi-studi tentang faktor usia dan jenis kelamin terhadap perilaku pemilihan sangat penting dilakukan, jumlah kaum wanita yang lebih lima puluh persen dari total populasi merupakan proporsi yang menentukan hasil pemilu jika terdapat korelasi erat antara jenis kelamin dan pola pilihan³⁴.

Berbicara tentang korelasi antara jenis kelamin dengan pola pilihan, Ramlan Surbakti menjelaskan terdapat perbedaan perilaku politik perempuan dari pria baik pada peringkat warga negara maupun pada peringkat elit yang dijelaskan dengan perbedaan belajar mengenai *sex roles* dan *sex role* yang pantas dalam bidang politik pada masa kanak-kanak atau masa ini diartikan sebagai sosialisasi politik³⁵.

Populasi perempuan yang melebihi setengah dari keseluruhan jumlah populasi merupakan suatu kajian yang menarik, apalagi mekanisme yang ada yaitu legitimasi pada hasil pemilihan umum yang mensyaratkan suara mayoritas, menjadikan posisi perempuan ini menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. Adanya perbedaan perilaku politik antara laki-laki dan perempuan, seperti yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti, menjadikan faktor sosial ini perlu diperhatikan.

Faktor sosial lainnya yang perlu diperhatikan yaitu orientasi kandidat. Pengaruh orientasi kandidat terhadap pola perilaku dan pilihan politik tidak tampak pada pemilu-pemilu

³⁴ Ibid, Hal. 88

³⁵ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 2002, Hal. 2

pada zaman orde baru, dengan sistem pemilu yang memilih partai, umumnya para pemilih tidak memperhatikan kandidat saat melakukan pencoblosan.

Sistem yang ada pada masa orde baru, memang tidak menyediakan ruang untuk proses pencoblosan kandidat. Tapi pada masa yang lebih demokratis, maka hal ini dimungkinkan. Perilaku pemilih pada pemilu 1999, walaupun masih sistem pencoblosan lambang partai, dipengaruhi faktor kandidat. Hal ini membuktikan bahwa sistem yang lebih demokratis akan membuka seluas-luasnya ruang kontestasi untuk setiap orang untuk “berkompetisi” sesuai dengan aturan yang ada.

Pada pemilu 2009 dengan sistem pemilihan tanda gambar partai dan nama kandidat, faktor kandidat legislatif akan memberi pengaruh besar terhadap perilaku memilih, terlebih-lebih pada pemilihan presiden dengan sistem pemilihan langsung. Terdapat bangunan kognitif yang digunakan oleh pemilih untuk menilai seseorang yang akan maju sebagai calon atau kandidat, sehingga faktor kandidat sangat berpengaruh terhadap pola pilihan pemilih.

D. Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Indonesia

Ada anggapan bahwa perwakilan rakyat tidak dijalankan dengan baik selama ini, terutama dikarenakan rakyat hanya memiliki sedikit kontrol atau hubungan dengan para wakil mereka. Banyak orang kemudian menyalahkan Sistem Pemilu atas keadaan tersebut, meskipun pada kenyataannya suatu kombinasi dari tiga faktor sistemik yang berkaitan dengan perwakilan rakyat berikut ini dapat dianggap telah berkontribusi terhadap problem itu.

Sistem penjaringan calon anggota legislatif (caleg) secara tertutup yang dikontrol oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik (parpol) dengan hanya sedikit memperhitungkan kepentingan lokal. Daerah pemilihan yang seringkali memiliki jumlah kursi sangat banyak – untuk DPR mencapai 82 dari setiap daerah pemilihan. Sistem Representasi Proporsional Daftar

Tertutup dimana parpol mengendalikan siapa dari caleg mereka yang akan mengisi kursi yang telah dimenangkan oleh parpol tersebut dalam setiap daerah pemilihan.

Sejak Pemilu Pemilu tahun 2004, untuk DPR dan DPRD dilaksanakan menggunakan format Representasi Proporsional Daftar Terbuka di daerah-daerah pemilihan yang baru. Tujuan utama dari sistem Representasi Proporsional Daftar Terbuka adalah untuk menghasilkan lembaga perwakilan dimana proporsi kursi yang dimenangkan oleh tiap partai mencerminkan proporsi total suara yang didapatkan oleh tiap partai. Dapat terjadi kasus dimana Negara secara keseluruhan merupakan daerah pemilihan (konstituensi) tunggal dari mana semua wakil rakyat dipilih atau mungkin ada beberapa konstituensi regional atau distrik –seperti di Indonesia– dari mana para wakil rakyat dipilih. Semakin besar jumlah konstituensi yang digunakan, semakin sedikit kemungkinan komposisi lembaga perwakilan akan sepenuhnya mencerminkan proporsi keseluruhan suara yang dimenangkan oleh setiap partai.

Sistem Representasi Proporsional Daftar Terbuka memberikan kendali pada pemilih atas kursi yang dimenangkan setiap partai di lembaga perwakilan dan calon anggota legislatif dari partai-partai tersebut yang akan mewakili pemilih dengan mengisi kursi-kursi tersebut. Meskipun demikian, karakteristik sistem sebagaimana yang diadopsi di Indonesia telah memberikan kekuasaan yang relatif besar mengenai seberapa besar pengaruh yang dimiliki pemilih atas calon yang mana dari partai pilihan mereka yang akan terpilih untuk mewakili mereka.

Pada Pemilu 2004 dan 2009 juga mengikutsertakan pemungutan suara untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) baru, menggunakan sistem yang dikenal sebagai Single Non Transferable Vote (SNTV). Pemilih akan memberikan suara hanya untuk satu calon saja. Semua

provinsi, masing-masing, merupakan sebuah daerah pemilihan anggota DPD. Setiap provinsi akan memilih empat perwakilan DPD –empat pemenang suara terbanyak di Provinsi tersebut.

Sistem SNTV mengandung isu-isu strategis yang menarik bagi aliansi calon-calon independen atau anggota partai politik. Para ahli strategi calon anggota harus menentukan jumlah ideal calon anggota dalam sebuah aliansi dan menentukan cara ideal untuk menggerakkan pendukung mereka agar memberikan suara bagi calon-calon anggota yang berbeda-beda untuk memaksimalkan jumlah calon anggota dalam aliansi yang akan terpilih.

Dalam Pemilu 1999, provinsi merupakan daerah pemilihan untuk Pemilu DPR dan DPRD tingkat Provinsi; dan Kabupaten/Kota adalah daerah pemilihan untuk Pemilu DPRD tingkat Kabupaten/ Kota.

Dalam Pemilu 2004 ada daerah-daerah pemilihan khusus untuk DPR dan DPRD. Secara umum, ia akan lebih sempit secara geografis, dan memilih wakil rakyat yang lebih sedikit dibandingkan Pemilu 1999. Ini mungkin (atau mungkin juga tidak) mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik antara wakil dan rakyat, bergantung pada faktor-faktor lainnya, seperti bagaimana cara calon anggota legislatif dijamin.

KPU menentukan batas-batas daerah pemilihan dan jumlah kursi (yaitu jumlah wakil yang akan dipilih) dalam tiap daerah pemilihan. Guna mendapatkan proporsionalitas yang baik dalam memberikan kursi pada partai politik yang berhasil meraih kursi, UU Pemilu menspesifikasikan rentang 3 sampai 12 wakil yang dapat dipilih di setiap daerah pemilihan DPR dan DPRD. Semakin besar rata-rata jumlah kursi dalam daerah pemilihan, semakin proporsional keseluruhan hasil Pemilunya. Semakin kecil rata-rata jumlah kursi dalam daerah pemilihan, semakin besar kemungkinan para calon yang terpilih akan berasal dari sejumlah kecil partai. Apakah jumlah kursi dalam sebuah daerah pemilihan harus lebih mendekati 3 atau 12, hal

tersebut tidak diatur lebih lanjut oleh UU, dan keputusan KPU tentang pelaksanaannya akan memiliki efek yang signifikan terhadap sifat dasar hubungan politik Indonesia di masa depan. UU juga menyerahkan penentuan prinsip-prinsip lain dalam pembentukan daerah pemilihan kepada KPU –contohnya, pertimbangan kondisi geografis, dan jalur transportasi/komunikasi.

Bagi DPR, daerah pemilihan untuk memilih 550 anggota DPR akan berupa provinsi itu sendiri (bagi provinsi yang berpenduduk sedikit) atau bagian-bagian dari provinsi (untuk provinsi yang berpenduduk lebih banyak). Undang-undang mengharuskan bahwa tidak ada provinsi yang boleh memiliki jumlah wakil di DPR lebih sedikit dari jumlah pada Pemilu 1999 dan provinsi yang dibentuk setelah Pemilu 1999 harus mempunyai minimal 3 wakil. Populasi rata-rata per wakil dapat bervariasi antara 325.000 (di provinsi dengan penduduk yang sedikit) dan 425.000 (bagi provinsi dengan penduduk yang lebih banyak). Tidaklah mungkin untuk memenuhi ketiga ketentuan tersebut diatas di semua provinsi dan KPU harus menentukan ketentuan yang mana yang akan didahulukan. Apapun keputusannya pasti akan menguntungkan atau merugikan berbagai kepentingan politik.

Untuk DPRD tingkat Provinsi, daerah pemilihan untuk dewan yang beranggotakan antara 35 dan 100 anggota (bergantung populasi suatu provinsi) akan dibentuk oleh KPU dari kabupaten/kota secara individual atau gabungan dari beberapa kabupaten/kota. Untuk DPRD tingkat Kabupaten/Kota, daerah pemilihan untuk dewan yang beranggotakan antara 20 dan 45 anggota (bergantung populasi suatu kabupaten/kota) dibentuk oleh KPU dari kecamatan secara individual atau gabungan dari beberapa kecamatan.

Jumlah populasi awal yang merupakan hasil pengumpulan data populasi dari program Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) digunakan sebagai dasar untuk menentukan alokasi kursi DPR dan DPRD. Menentukan batas daerah pemilihan akan

merupakan proses yang rumit. Bergantung pada jumlah rata-rata kursi per daerah pemilihan, diperkirakan ada 1600–3200 daerah pemilihan yang harus dibentuk. Sementara KPU secara independen menentukan batas-batas daerah pemilihan, setiap batasnya akan menjadi subyek perdebatan politik yang intensif.

Caleg bagi DPR/DPRD harus merupakan anggota partai politik dan dicalonkan oleh partainya dalam proses yang ‘demokratis dan terbuka’. Dibawah sistem Representasi Proporsional Daftar Terbuka, suatu partai menyerahkan daftar caleg untuk setiap daerah pemilihan. Partai-partai politik harus menyerahkan daftar caleg untuk kepentingan pencalonan pada Komisi Pemilu yang relevan (KPU) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Setiap partai dapat mencalonkan sejumlah calon anggota hingga maksimum 120% dari jumlah perwakilan yang akan dipilih dalam tiap daerah pemilihan. Tidak ada jumlah minimum yang ditentukan untuk calon anggota dalam daftar calon anggota.

Partai politik didorong untuk mencalonkan paling tidak 30% calon anggota perempuan dalam daftar calon anggota mereka dalam setiap daerah pemilihan. Setiap partai bebas menentukan urutan nama calon dalam setiap daftar calegnya. Pada Pemilu 1999 dan 2004, penentuan caleg terpilih dilakukan berdasarkan ketentuan nomor urut. Hal ini dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi caleg-caleg yang bekerja keras dalam satu partai akan tetapi dia berada pada urutan sepatu.

Pada pemilu 2009, keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal tersebut memberikan dampak yang luas. Penentuan caleg terpilih dari sebuah partai tidak mesti dengan ketentuan nomor urut calegnya. Penentuan caleg terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh oleh caleg setelah ditentukan akumulasi suara partai. Dari total akumulasi suara yang diperoleh partai politik, kemudian disesuaikan dengan perolehan berdasarkan batas BPP,

maka akan diketahui ada beberapa orang yang akan ditentukan menjadi pemenang. Jika akumulasi suara mencapai batas BPP, maka caleg-caleg yang memiliki suara terbanyaklah yang berhak atas 1 atau 2 kursi yang diperoleh oleh partai yang bersangkutan.

E. Kerangka Pemikiran

Perilaku politik dan Pilihan merupakan suatu produk sosial yang tidak hadir begitu saja. Berbagai faktor dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat dapat menjadi variabel yang sangat berpengaruh. Perilaku politik dan pilihan politik terkait sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik³⁶. Keikutsertaan seseorang dalam hal ini dapat sebagai warga negara biasa maupun sebagai pengambil keputusan. Dalam penelitian ini, fokusnya pada perempuan sebagai warga negara yang ikut dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yaitu proses pemilihan umum anggota legislatif. Dalam proses ini, perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki karakteristik dalam perilaku politik. Perilaku politik perempuan mencakup pilihan-pilihan politik seperti keikutsertaan dalam pemungutan suara dan pilihan terhadap kandidat yang ada. Pilihan politik perempuan ini, dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor sosial, dan diuraikan dalam tulisan ini.

Setiap individu perempuan maupun laki-laki memiliki hak untuk ikut serta tanpa kecuali. Demokrasi sebagai proses yang berkesinambungan meniscayakan persamaan dan kesetaraan, kesempatan yang terbuka bagi semua orang. Dalam konteks negara kebangsaan, sistem masa lalu yang sangat sentralistik telah digeser ke dalam sistem yang lebih demokratis. Runtuhnya resim orde baru pada tahun 1998, ditandai dengan masuknya era reformasi, masa ini adalah masa pembaharuan disemua dimensi kehidupan. Tidak terkecuali dalam sistem politik yang dulu sangat sentralistik dan terpusat, kemudian digeser ke sistem federalis.

³⁶ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1992, Hal. 131

Sistem pemilihan umum dalam memilih anggota-anggota legislatif secara langsung berarti pula melibatkan masyarakat dalam pemilihan umum untuk memilih dan terlibat langsung. Sistem ini pun mensyaratkan akumulasi jumlah suara sebagai legitimasi masyarakat. Jumlah pemilih dalam suatu pemilihan umum ternyata didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah yang melebihi setengah dari populasi merupakan proporsi yang sangat menentukan dalam pemilihan umum. Posisi inilah yang membuat perempuan sebagai pemilih mayoritas menjadi patut untuk dikaji. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang ikut memilih, memiliki pola perilaku politik tertentu. Tindakan, sikap, dan juga perilaku politik seseorang, merupakan bentuk dari bangunan kognitif dan pemahaman yang terbentuk melalui proses yang panjang. Sosialisasi dari usia dini, lingkungan keluarga, budaya masyarakat adalah hal-hal yang berpengaruh dalam perkembangan, pembentukan pemahaman politik seseorang.

Seperti yang disebutkan oleh Almond bahwa dalam sistem politik, mewujudkan dirinya pada pola tindakan-tindakan dan orientasi-orientasi politik tertentu, dan setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan yang hadir dalam sistem politik tertentu akan memiliki pola orientasi dan tindakan tertentu sesuai dengan bangunan kognitifnya.

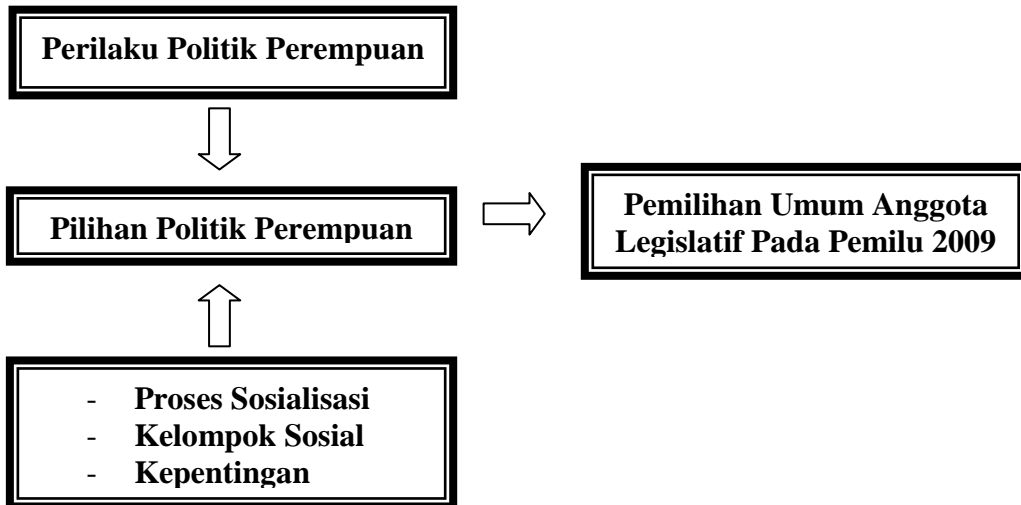
Perilaku politik dan juga pilihan politik pemilih perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor, struktur sosial budaya dan juga sistem politik yang ada. Seperti halnya perempuan, terdapat konteks yang melatarbelakanginya. Menurut Mansor Fakih, terdapat pelabelan terhadap perempuan, bahwa perempuan itu irasional, emosional sehingga tidak bisa menjadi pemimpin. Hal ini yang membuat perempuan menjadi makhluk nomor dua dalam masyarakat. Lebih lanjut disebutkan bahwa marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga, marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.

Hal itu akan berimplikasi pada setiap aspek kehidupan perempuan, sampai kepada perilaku politiknya, lebih lanjut diungkapkan oleh Surbakti, bahwa terdapat sosialisasi yang berbeda antara pria dan wanita. Karakteristik biologik dan siklus kehidupan, akses yang tidak sama terhadap sumber daya khususnya pendidikan, profesi dan keuangan. Hal ini dapat menjadi penjelas terhadap pola partisipasi perempuan yang umumnya berbentuk kendala. Pola perilaku politik dan pilihan politik perempuan menjadi tidak independen dan cenderung bersifat mobilitatif.

Perilaku politik perempuan dan juga pilihan-pilihan politiknya, dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan lingkungan politik yang merupakan tempat berlangsungnya sosialisasi yang panjang, ada berbagai transfer nilai-nilai dalam kelompok dan lingkungan sosial ini. Lingkungan sosial pemilih perempuan juga menyediakan berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan bangunan kognisinya. Hal inilah yang nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku politik perempuan dan pilihan-pilihan politiknya.

Dari uraian diatas, maka kerangka analisis dapat dikembangkan dengan model sebagai berikut:

Perilaku Pemilih Perempuan pada Pemilu Legislatif 2009
di Kabupaten Kolaka Utara



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Kolaka Utara khususnya Kecamatan Katoi merupakan daerah pemekaran baru, dimana sejak sebelumnya tingkat heterogenitas kultural di daerah sedemikian tinggi yang disebabkan oleh para pendatang baru baik domestik, regional maupun luar daerah. Pendatang dari luar daerah, yang datang bertransmigrasi (Transmigran dari Jawa, dan Lombok) yang kemudian seiring dengan berjalannya waktu, terjadi pertumbuhan dan peningkatan infrastruktur di kecamatan ini kemudian semakin membuat daerah ini menjadi daerah yang potensial. Sehingga menarik minat pendatang domestik (Kabupaten Kolaka) dan Sulawesi Tenggara.

Sebagai wilayah transisi, kemajemukan kultural wilayah ini menurut penulis dapat menjadi sumber/ciri khas nilai yang menjadi faktor bagi perilaku yang menentukan pilihan-pilihan politik masyarakat di daerah ini. Kemajemukan dengan tingkat kepentingan politik yang relatif heterogen, baik berdasarkan faktor kultural, kesejahteraan tentunya akan menjadi menarik untuk diteliti pada objek/lokasi penelitian yang telah penulis jelaskan di atas.

Untuk mengetahui perilaku politik dalam hal ini pilihan politik perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan, maka yang dijadikan subyek penelitian disini adalah perempuan berusia diatas tujuh belas tahun dan telah menikah serta berdomisili di Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka dengan unit analisisnya adalah individu.

B. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian

Dalam penelitian ini, sesuai dengan tujuan serta konseptualisasinya, maka penulis ingin mengetahui lebih jelas dan mendalam gambaran tentang fokus penelitian ini, yaitu pilihan politik perempuan pada pemilihan Umum Tahun 2009 dengan mencari faktor-faktor yang mendasari perempuan untuk menjatuhkan pilihannya pada kandidat Calon Legislatif dan Partai Politik pada Pemilu 2009. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian (Saifuddin Azwar, 1997:7). Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis masalah. Telaah pada penelitian ini, dilakukan secara intensif dan mendetail dan komprehensif berbagai variable yang diteliti.

Untuk mengetahui bagaimana pilihan politik perempuan, maka dalam penelitian ini digunakan dasar penelitian kualitatif. Dasar penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data deskriptif yang lebih mendalam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkapkan fakta mengenai variabel yang diteliti (ibid : 91). Dengan tujuan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yaitu:

- 1) Wawancara, adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Merupakan suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara, penulis secara langsung melakukan wawancara dengan informan yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti atau informan

yang berkenaan dengan tema penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan mendalam atau pedoman wawancara.

- 2) Studi pustaka, yakni membaca sumber-sumber literatur mengenai tema yang dikaji tentang perilaku politik, perempuan dan politik, dan teori-teori sosial yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan informasi tertulis lainnya yang membahas tentang hal ini.

D. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan. Informan yang terjaring dalam penelitian ini, berasal dari berbagai kalangan profesi dan tingkat pendidikan yang juga berbeda-beda.
2. Data sekunder, yaitu data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, selain itu terdapat situs-situs yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi penelitian ini.

E. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini, adalah orang-orang atau pihak yang dinilai dapat memberikan informasi dan data seakurat mungkin. Penelitian tentang perilaku politik perempuan – tidak harus memilih informan dari perempuan saja, melainkan dari laki-laki juga yang tentunya dapat memberikan informasi yang akurat . Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga

keobyektifan data dan informasi, sehingga informan yang dipilih terdiri dari laki-laki dan perempuan. Polarisasi dari informan yang dipilih terdiri dari :

1. Akademisi
2. Politisi
3. Mahasiswa
4. Ibu Rumah Tangga
5. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam penelitian ini juga melibatkan informan laki-laki (yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah gender). Kapasitasnya sebagai pihak yang sering bersentuhan dengan masalah perempuan. Dua informan laki-laki juga berasal dari mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat desa.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu adanya penjelasan semua data semaksimal mungkin sesuai konsep dan teori-teori yang relevan. Data-data dari hasil wawancara, dicatat secermat dan serinci mungkin. Sehingga menjadi suatu catatan lapangan. Semua data kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dibalik realitas dapat diungkap. Bagian ini juga menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian yang akhirnya akan diinterpretasikan dan disimpulkan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Kabupaten Kolaka Utara membentang dari Utara ke Selatan pada Bujur 120°45'00" sampai 120°30'13" BT dan Lintang 02°00'00" sampai 03°30'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur (Provinsi Sulawesi Selatan).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Konawe Utara (Provinsi Sulawesi Tenggara).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kolaka (Provinsi Sulawesi Tenggara).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Timur Teluk Bone.

Kabupaten Kolaka Utara yang beribukota Lasusua, secara umum terdiri dari daerah lembah, perbukitan dan laut, memiliki 2 (dua) musim yakni musim Timur dan musim Barat, pada musim Timur curah hujan rendah sedangkan musim Barat curah hujan tinggi. Agama yang dianut untuk Islam 98%, sisanya penganut agama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Mata pencaharian pokok penduduk Kolaka Utara sebagai petani kakao (coklat) dan cengkeh, serta nelayan. Daerah ini terdiri wilayah daratan seluas $\pm 3.391,62$ Km, disertai pulau-pulau kecil dengan pemandangan yang indah. Selain itu, juga memiliki wilayah perairan laut membentang sepanjang Teluk Bone, seluas ± 12.376 Km². Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dari Utara ke Selatan yakni; Kecamatan Tolala, Purehu, Batu Putih, Pakue Utara, Pakue Tengah, Pakue, Watunohu, Ngapa, Tiwu, Kodeoha, Katoi, Lasusua, Lambai, Ranteangin dan Kecamatan Wawo.

penyeberangan laut. Kedudukannya yang berhubungan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai sentral pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia

merupakan posisi yang sangat strategis, diharapkan dapat memiliki *spread effect* (daya sebar) yang tinggi dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan beradab. Visi pembangunan daerah, yakni: *“Terwujudnya masyarakat daerah kabupaten Kolaka Utara yang damai, demokratis, berkeadilan sosial, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam bingkai Otonomi Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia daerah yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi serta memiliki etos kerja tinggi dan berdisiplin*

A. Gambaran Singkat Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara

Kecamatan Katoi merupakan wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa desa, yakni desa Tanjung tobaku, Katoi, Simbula, Maruge, Lambuno, dan Lanipa-Nipa. Wilayah kecamatan ini berjarak sekitar 11 Km dari Ibukota Kabupaten Kolaka Utara.

Wilayah kecamatan ini, disebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Kodeoha, di sebelah Selatan Kecamatan Lasusua. Komposisi penduduk kecamatan ini terdiri dari 10% Suku Toraja, 13% suku Bugis, Luwu 60% dan Tolaki 17%.

Jumlah penduduk kecamatan katoi kolaka utara adalah 7499 dan jumlah penduduk laki-laki 3783 dan perempuan 3716. Jumlah DPT(daftar pemilih tetap), laki-laki 1931(48,21%) dan perempuan 2074(51,78%).

Pada pemilu 2009, wilayah ini masuk dalam Dapil III, yang terdiri dari Kecamatan Lasusua, Kodeoha dan Kecamatan Katoi. Pada pemilu 2009 yang lalu dari Dapil III, yang lolos untuk duduk di DPRD Kabupaten Kolaka Utara adalah Bapak Anton, SH, dan juga seorang wakil yang berasal dari Kecamatan Katoi sendiri adalah Bapak Azis Pasangga.

B. Kehidupan Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya Masyarakat kecamatan Katoi dari sisi mata pencaharian sudah beragam, dan yang paling mendominasi adalah profesi sebagai petani,(kakao,cengke ,nilam.)selain itu ada pula yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil dan nelayan.

Masyarakat Katoi memiliki budaya gotong royong, terlihat dari kebiasaan mengadakan kegiatan bersama seperti Jumat bersih yaitu membersihkan lingkungan desa misalnya jalan-jalan, membersihkan mesjid, dan perkantoran desa, ini dilaksanakan di setiap desa. Selain itu ketika ada hajatan seperti pesta pengantin maka masyarakat akan terlibat membantu penyelenggaraan pesta tersebut, bahkan ketika ada salah seorang masyarakat yang meninggal dunia keterlibatan masyarakat Katoi lebih banyak lagi untuk membantu keluarga yang berduka seperti memberikan sumbangsi berupa kain kafan, penggali kubur sampai sumbangan berupa uang atau beras.

Tokoh yang dihormati oleh masyarakat di kecamatan Katoi adalah pejabat negara, Periode ini Camat Kecamatan Katoi bernama Tamhil S.Pd. kebanyakan Masyarakat akan mengikuti himbauan dari pemerintah misalnya apabila masyarakat diintruksikan berkumpul di balai desa atas suatu urusan maka masyarakat akan mengikutinya.

BAB V

PEMBAHASAN

Pilihan merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum. Perilaku baik secara umum ataupun perilaku pada wilayah yang lebih spesifik seperti perilaku politik, merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang cukup kompleks. Interaksi itu melibatkan banyak hal, mulai dari bentuk interaksi, karakter lingkungan dan juga karakter masyarakat. Dalam interaksi sosial, terdapat berbagai stimulus yang akan disambut dan dikelola oleh bangunan kognisi masyarakat yang berbeda-beda. Perilaku politik juga berupa proses yang melibatkan berbagai hal. Stimulus politik atau suatu fenomena akan ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung bangunan kognisinya. Pemahaman akan sesuatu merupakan bentukan proses yang panjang yang melibatkan lingkungan sosial yang memiliki pengaruh yang besar.

Pada dasarnya, pilihan politik tidak hanya mencakup adanya bangunan kognisi, stimulus politik dan juga penafsiran. Tapi juga mencakup aspek yang bersifat afeksi berupa emosional dan juga aspek psikologis. Cakupan kesemua hal tersebut dapat dinyatakan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek politik. Informasi sangat penting dalam proses ini, setiap informasi akan dikelola untuk kemudian menyambut informasi selanjutnya. Perbedaan akses informasi dan perbedaan sosialisasi dalam suatu masyarakat, menjadikan setiap tindakan atau reaksi menjadi berbeda-beda.

Hal ini pun berdasar pada rumusan masalah untuk menggali perilaku politik dalam hal ini pilihan politik perempuan di Kecamatan Katoi. Bab ini akan mengulas secara mendalam tentang pilihan politik perempuan. Cakupannya berkisar pada pilihan-pilihan politik, selain itu terdapat sikap dan tindakan yang juga berupa partisipasi dalam pemilihan anggota legislatif. Ada berbagai

temuan pada bagian ini. Kondisinya tidak sama pada setiap perempuan, sebab setiap perempuan memiliki konteks masing-masing. Berbagai faktor-faktor sosial juga sangat berpengaruh. Adanya akses informasi yang berbeda dan juga proses sosialisasi di lingkungan masing-masing juga menjadi variabel yang sangat berpengaruh terhadap pilihan politik.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan yaitu pada bulan Desember 2010 sampai dengan Februari 2011. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan informan, berbagai literatur dan artikel-artikel, surat kabar dan juga tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tema yang diteliti dan sangat membantu dalam penelitian ini.

Pada proses penelitian ini terjaring sebanyak 14 (empat belas) orang informan perempuan yang kesemuanya berdomisili di Kecamatan Katoi. Polarisasi dari informan ini dimaksudkan agar informasi atau data yang didapatkan lebih kaya dan lebih variatif. Dari tujuh responden yang ditemui masing-masing berasal dari kalangan dan profesi yang berbeda. Informan yang ditemui diantaranya berasal dari kalangan LSM, politisi (Pengurus Partai), mahasiswa, dan ibu rumah tangga, salah satu dari seluruh informan perempuan adalah Petani dan ia adalah seorang orang tua tunggal (suami sudah meninggal).

Pada bagian ini, dihadirkan gambaran tentang pilihan politik perempuan dan hal-hal yang mendasari pilihan tersebut. Terdapat faktor sosial yang menyebabkan pilihan politik ini menjadi sangat beragam. Faktor-faktor sosial pun menjadi hal yang sangat berpengaruh dan dari hal tersebut dapat diidentifikasi orientasi pemilih dan hal-hal yang mendasari pilihan-pilihan politik perempuan.

A. Pilihan Politik perempuan pada pemilihan Umum 2009

Dalam pemilihan umum, jumlah perolehan suara partai maupun perolehan suara perorangan dari calon legislatif akan menentukan seberapa banyak kursi yang diraih oleh suatu partai maupun caleg yang akan menduduki kursi tersebut. Untuk menentukan seseorang/partai menduduki satu kursi di DPRD Kabupaten Kolaka Utara maka setidaknya dia membutuhkan perolehan suara hingga mencapai ambang batas jumlah BPP. Biasanya untuk DPRD dengan populasi pemilih sekitar 4000an, maka seorang calon legislatif setidaknya mengantongi suara sebanyak 1500 – 2000 Suara untuk duduk sebagai anggota DPRD.

Melihat segi kuantitas, jumlah pemilih perempuan lebih dari lima puluh persen melebihi jumlah populasi pemilih laki-laki, proporsi ini tentunya cukup berpengaruh pada hasil pemilu. Perilaku memilih merupakan produk sosial, ada berbagai faktor sosial yang saling berpengaruh dan memunculkan berbagai reaksi terhadap objek-objek politik. Pada bagian ini juga digambarkan mengenai informasi-informasi yang diperoleh oleh perempuan tentang proses pemilihan caleg dan partai serta proses politik yang ada. Informasi yang diterima akan saling terkait dengan lingkungan sosial dan karakter dan aspek kognisi perempuan. Selain itu akan diidentifikasi keikutsertaan dan informasi yang di terima tentang proses tersebut seperti caleg-caleg yang maju pada Pemilu 2009.

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sejauh mana informasi yang diterima oleh perempuan pada proses pemilihan anggota legislatif, maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai indikator untuk mengetahui hal tersebut dan juga untuk mengetahui keikutsertaannya pada pemilihan umum. Diantaranya; apakah anda ikut memilih Dan siapa yang anda pilih Pertanyaan yang lebih mendetail juga diajukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang informasi dan pengetahuan perempuan seperti; tanggapan terhadap keterlibatan perempuan pada proses

pemilihan umum, dan seberapa penting proses pemilihan umum berpengaruh pada kehidupannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan perempuan, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan terhadap proses pemilihan umum untuk anggota legislatif berbeda-beda. Hal ini juga terlihat dari aspek keikutsertaan pada pemilihan umum yang tidak diikuti oleh seluruh informan. Hal ini pun terkait dengan aspek prioritas suatu pemilihan pada kehidupan informan. Berikut ini diuraikan tentang pilihan-pilihan politik perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 di Kec. Katoi.

Dari sejumlah informan yang diwawancarai, terdapat empat orang dari tujuh informan perempuan yang mengaku melibatkan diri atau ikut memilih pada pemilihan umum legislatif pada tahun 2009. Partisipasi yang tinggi di tunjukkan oleh seorang informan yang memang seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat setempat, ia tidak sekedar ikut memilih tapi mengetahui visi dan misi setiap kandidat. Adanya alasan yang jelas untuk menjatuhkan pilihan juga diakui oleh seorang akademisi. Keikutsertaan perempuan pada wilayah yang mempengaruhi kebijakan publik dan menganggap bahwa perempuan harus punya peran ditunjukkan oleh seorang informan perempuan dari Partai Golkar. Akses terhadap informasi menjadi hal yang sangat berpengaruh, hal ini juga ditunjang oleh tingkat pendidikan yang memudahkan terhadap akses informasi.

Rosdiana, salah seorang informan, dia seorang yang aktif di LSM. Dalam wawancara yang dilakukan di rumahnya, dia mengakui bahwa banyak informasi yang dia terima tentang proses politik tersebut. Informasi tersebut didapatkan dari keluarga dan dari sejumlah media massa. Dalam hal pilihan politiknya, Nur Jannah mengaku memiliki alasan yang kuat untuk menjatuhkan pilihannya berdasarkan keinginannya. Nur Jannah mengungkapkan:

“....perempuan harus mandiri dalam menentukan pilihannya, meskipun akan banyak yang mempengaruhi termasuk dalam keluarga saya, kolega dan sahabat saya, saya sering terlibat dalam dialog maupun perdebatan dengan mereka, saya sendiri mempunyai pendirian yang kuat dengan segala informasi yang saya miliki tentang para caleg yang ada saya merasa yakin dengan pilihan saya, saya tidak ingin diintervensi dalam memilih, saya harus objektif dalam melihat figur caleg, ya..caranya adalah dengan menilai visi dan misi beserta programnya....” (wawancara tanggal 15 Desember 2010)

Selain akses informasi yang mudah, Nur Jannah yang merupakan seorang Sarjana Hukum, juga mempunyai lingkungan sosial yang mendukung untuk memudahkan dia mengetahui berbagai proses politik pada pemilihan Umum Legislatif tahun 2009. Pilihan rasional Nur Jannah tidak didasarkan pada sesuatu yang menjadi pilihan atau apa menjadi sumber pilihannya sebagai individu atau aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan tindakan pilihan aktor (Ritzer & Goodman, 2003:357).

Pilihan politik Rosdiana merupakan hasil dari proses sosialisasi, dengan akses informasi ide dan Visi misi serta program yang diusung calon legislatif. Sehingga dengan pengetahuan yang diperoleh itulah, menjadi dasar dalam memberikan penilaian terhadap objek-objek politik. Informasi ini bisa saja diterima oleh individu melalui media, keluarga dan lingkungan sosial atau melalui kampanye yang dilakukan oleh para caleg itu sendiri.

Informan lain mengungkapkan bahwa pola partisipasi dan keterlibatan perempuan pada pemilihan umum legislatif 2009 lalu belum menunjukkan perbaikan yang memuaskan. Asma Ulmi, informan yang di temui di kediamannya menganggap bahwa perubahan ini belumah begitu besar. Asma yang merupakan mantan caleg perempuan dari Partai Gerindra, melihat adanya perubahan yang belum cukup baik pada keterlibatan dan perilaku memilih perempuan. Pada wilayah pilihan-pilihan politik sebagian belum dapat menjatuhkan pilihannya dengan

penilaian yang objektif, banyak informasi yang mengenai profil Partai maupun caleg tidak didapatkan secara memadai oleh perempuan. Hal ini dinyatakan oleh Asma Ulmi :

“...perkembangan dalam partisipasi dan perilaku memilih perempuan terutama di kecamatan katoi ini hingga saat ini belum cukup memuaskan menurut saya, jika perempuan di sini objektif dalam memilih. Bagaimana mereka dapat memilih dengan objektif, sementara informasi tentang partai dan caleg tidak mereka tahu. perempuan di sini dalam memilih sangat tergantung pada pilihan suaminya, atau orang tuanya....”(wawancara Tanggal 19 Desember 2010)

Lingkungan sosial memberikan ruang untuk mengolah suatu informasi, dan memunculkan reaksi terhadap stimulus politik. Pola partisipasi yang didasarkan oleh memadainya informasi yang diterima dan akses yang mudah terhadap informasi tersebut, memunculkan reaksi yang berbeda-beda terhadap objek politik. selain melibatkan bangunan kognisi, aspek afeksi dan aspek evaluatif juga memiliki peranan dalam tindakan yang dimunculkan sebagai reaksi. Pilihan politik didasarkan pada pengetahuan dan kumpulan informasi. Informasi yang ada digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melihat proses politik. Salah seorang informan yang berasal dari LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan Perempuan dan anak, saat dijumpai dikantornya menganggap bahwa proses politik yang ada cenderung tidak sesuai dengan yang semestinya. Proses politik yang dia amati mestinya bisa lebih dewasa dan mendidik masyarakat.

Pada intinya informan yang satu ini lebih mengutamakan prosese sosialisasi sekalipun dia sendiri belum puas dengan sosialisasi yang di lakukan KPK dan calon legislative itu sendiri.

Hal ini yang menimbulkan kekecewaan terhadap proses yang ada. Pada dasarnya, Rasni Rala P. tetap menganggap bahwa pemilihan Umum anggota Legislatif merupakan proses yang penting demi kebaikan bersama. Karena itu prosesnya harus lebih lebih baik dan sehat, dan tidak seperti sebelum-sebelumnya. Rasni Rala P mengungkapkan :

“....saya agak kecewa dengan kondisi pemilu saat ini, seperti yang saya amati, kurang ada kedewasaan dalam berpolitik dari para caleg, misalnya cara kampanye yang cenderung masih biasa-biasa saja dan penuh basa basi, sentilan dan slogan-slogan kosong yang sulit dimengerti, visi dan misi yang disampaikan juga tidak cerdas, malah caleg tidak tahu bagaimana menyampaikan visi dan misinyaitu kan namanya caleg tidak capable untuk duduk sebagai anggota dewan, mestinya partai politik selektif dalam emilih dan menentukan caleg sehingga tidak memalukan, atau si caleglah yang harus benar-benar bisa mengukur dirinya, tidak sekedar hanya maju untuk memenuhi ambisi berkuasa yang hanya bermodalkan banyaknya uang, maupun nama besar keluarga di masa lalu....karenanya bagi saya tidak ada yang perlu dipilih pada Pemilu kali ini....” (wawancara pada tanggal 25 Desember 2010)

Informasi yang diterima, akan diolah dan dikaitkan dengan prefensi tentang proses politik yang ada, hal ini merupakan bagian evaluatif dan nantinya memunculkan reaksi. Menurut Rasni, proses pengamatan selama ini dengan mengumpulkan berbagai informasi, dan nantinya terdapat alat yang dapat menilai jalannya proses politik selama ini. Ketidakikutsertaannya dalam pemilihan Umum Legislatif 2009 lalu diakuinya bukan sebagai bentuk apatis dan tidak peduli. Justru itu adalah bentuk kepedulian terhadap realitas meskipun tidak ikut memilih dalam pemilu

Salah seorang informan yang juga adalah mahasiswa UNHALU, juga memaparkan tentang proses Pemilu Legislatif secara keseluruhan yang belum maksimal. Yelni Febriani yang seorang mahasiswi juga cukup mengamati proses keterlibatan perempuan pada Pemilu Legislatif tahun 2009 di kecamatan Katoi. Pada Pemilu 2009, Yelni mengaku tidak ikut memilih, pada saat yang bersamaan Yelni sedang berada di Kendari dengan urusan yang menurutnya lebih penting dari pada ikut pemilihan. Menurut Yelni, proses politik dengan memilih kepala daerah secara langsung belum tentu dapat mengakomodasi berbagai keingnannya. Yelni menuturkan:

“....Waktu itu saya ada kegiatan penting di kampus, dan saya tidak merelakan kegiatan saya saat itu hanya untuk memilih, tapi jika saya ada di Katoi, saya mungkin akan disuruh memilih salah seorang caleg yang berasal dari anggota keluarga, namun demikian bagaimanapun pasti kondisinya tidak berbeda banyak dengan keinginan saya ketika saya ikut memilih atau tidak...” (wawancara tanggal 26 Desember 2010)

Yelni adalah seorang informan yang mengumpulkan banyak informasi tentang proses Pemilu Legislatif, proses politik biasanya dipahami sebagai upaya untuk menciptakan tatanan yang lebih baik dalam masyarakat, makanya dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Informasi yang diterima akan diolah dengan berbagai pengetahuan tentang realitas politik yang ada. Kedua informan yang ditemui pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap jalannya proses demokrasi. Sehingga memunculkan reaksi terhadap realitas yang ada. Reaksi tersebut berupa ketidaksetujuan dengan mekanisme yang dianggap tidak semestinya. Menurut Coleman sebagai individu yang dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud, artinya individu atau aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu (Ritzer & Goodman, 2003:357) Berdasarkan pengetahuan dan bangunan kognisi serta memadainya informasi yang diterima oleh perempuan membuat pilihan politik didasarkan pada realitas dan penilaian terhadap proses politik yang diamati.

Dalam penelitian ini juga terdapat informan perempuan yang memiliki pengetahuan yang sangat kurang dalam menentukan pilihannya pada Pemilu 2009 lalu. Kami menemukan dua orang informan yang dijumpai bahkan tidak mengetahui nama-nama caleg. Adapula yang hanya mengetahui beberapa partai, yakni hanya Partai Golkar saja, bahkan cara mencoblos pun kurang dimengerti.

Ibu Dg.Bacce yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani berusia 45 tahun dan juga mengurus rumah tangga, mengakui bahwa dia tidak tahu nama-nama caleg yang maju pada Pemilu legislatif 2009 di Dapilnya. Saat dijumpai di tempat tinggalnya ia mengaku ikut memilih pada Pemilu Legislatif 2009 lalu, tapi sudah lupa nomor berapa partai yang dia pilih, bahkan katanya dia hanya menusuk partai saja, ia tidak tahu bagaimana memilih calon anggota legislatif, lagi pula dia tidak mengenal dan tidak tahu siapa-siapa yang maju menjadi caleg dari partai yang

ia pilih. Ibu Dg.Bacce hanya memberitahukan gambar salah satu partai yang dia ingat sejak dahulu kala yang ia sering pilih di masa lalu, akan tetapi katanya ia sulit menemukannya, sehingga ia membutuhkan waktu yang cukup lama mencarinya namun akhirnya ia menemukannya juga, ia sempat di suruh untuk memilih seorang calon legislatif yang diminta secara khusus oleh pak dusun, berikut petikan wawancara dengan ibu Dg.Bacce :

“.... Saya cuman petani kasihan...sehari-hari saya kalo bukan ke kebun saya di rumah saja, saya selalu ikut dalam mencoblos. Saya tidak tahu siap-siapa namanya calon yang ada di daftar. Dulu mudah, cuman pakai gambar partainya saja. Itu pula yang saya pilih sekarang. Pak dusun pernah datang ke rumah bawa poster, waktu itu katanya ini bagus untuk dipilih, tapi terserah kita siapa yang akan di pilih, saya mau ikuti tapi sulit kudapat fotonya, karena banyak sekali....” (wawancara tanggal 29 Desember 2010)

Ibu Dg.Bacce mengaku tidak lulus pendidikan Sekolah Dasar, dia juga kurang bisa membaca dan menulis. Ibu Dg.Bacce tidak terlalu tertarik dengan informasi secara umum termasuk perkembangan politik. Hal yang penting menurutnya adalah ke kebun untuk merawat tanamannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat memilih ibu Dg.Bacce mengikuti anjuran dari Kepala Dusun di tempat tinggalnya, ketiadaan/kurangnya informasi membuat ibu Dg.Bacce mudah untuk diarahkan atau lebih memilih referensi lama yang dia lakukan pada pemilihan-pemilihan sebelumnya. Kecenderungan seperti ini biasa disebut dengan habituasi, dimana kuatnya ingatan lama, dan dominasi partai Golkar terhadap pemilih masih merupakan referensi yang kuat hingga saat ini meskipun telah terjadi perubahan tata cara memilih.

Salah seorang ibu rumah tangga yang ditemui di kediamannya, mengakui tidak ikut memilih karena tidak memiliki kartu pemilih, katanya sejak di desanya berganti kepala Desa di desanya tempat tinggalnya dia sulit untuk mendapatkan kartu sehat, kartu miskin dan apalagi kartu memilih padahal dia memiliki KTP. Ibu Idha yang seorang ibu rumah tangga, dengan pendidikan sampai tingkat SLTP, tidak terlalu memperdulikan kartu pemilih yang tidak dia dapatkan. Dia juga mengaku tidak terlalu mengenal kandidat yang maju sebagai caleg. Hanya

salah satu orang caleg yang dia tahu namanya tapi tidak mengetahui lebih jauh. Informasi yang didapatkan sangat minim. Idha mengatakan :

“....Saya tidak terlalu tahu dengan kandidat, saya Cuma biasa dengar namanya, lainnya saya sudah lupa, saya juga punya KTP tapi tidak memiliki kartu pemilih semenjak kepala desa disini berganti dan itu sudah berlangsung beberapa tahun....”(wawancara tanggal 30 Desember 2010)

Dari pernyataan-pernyataan informan yang ditemui, diketahui bahwa proses pemilihan Umum legislatif tahun 2009, merupakan suatu hal yang tidak prioritas. Minimnya informasi ditemui pada kedua orang ini, Membuat pengetahuan terhadap proses pemilihan anggota legislatif menjadi suatu hal yang sangat kabur. Pada saat memilih pun, pilihannya dapat sangat mudah diarahkan. Dari data yang ditemukan, kedua informan ini tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai, dan pengetahuan yang sangat minim terhadap politik.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan

Pada setiap pemilihan umum, warga negara yang terdaftar berhak untuk ikut berpartisipasi dan menjatuhkan pilihan-pilihan berdasarkan keinginan dan penilaiannya. Keikutsertaan perempuan yang merupakan kelompok besar secara kategorial, dapat diukur pada proses ini. Tingkat partisipasi dapat dibandingkan dengan jumlah kuantitas, yang pada dasarnya akan merasakan hasil dari proses demokrasi ini. Perempuan dengan jumlah setengah dari populasi merupakan proporsi yang cukup memiliki korelasi dengan hasil pemilu (Nursal, 2004:88)

Pilihan-pilihan politik perempuan tentunya tidak hadir begitu saja, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai hal. Perempuan dan politik merupakan suatu fenomena yang khas, dan didalamnya mencakup pola perilaku politik perempuan dengan berbagai faktor sosial yang mempengaruhinya.

Pada pemilihan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009, merupakan rangkaian proses demokrasi yang menyajikan berbagai rangkaian peristiwa, setiap individu akan menyambut hal tersebut secara berbeda-beda. Ada tentunya ada banyak ragam informasi yang harus disediakan, baik oleh pelaksana Pemilu terkait dengan tata cara memilih yang baik dan benar, maupun dari peserta Pemilu sendiri (partai dan Caleg) terutama mengenai apa yang akan mereka lakukan sebagai bentuk kontribusi positif mereka jika ingin dipilih.

Keterpenuhan informasi tentang proses ini tergantung akses untuk mendapatkan informasi tersebut. *Stereotype* terhadap masalah politik sebagai wilayah publik cenderung dianggap sebagai wilayah laki-laki, menjadi hambatan bagi perempuan yang dianggap mengurus wilayah domestik. Hal ini membuat akses terhadap informasi menjadi berbeda.

Ada berbagai hal yang terlibat dalam proses munculnya perilaku politik perempuan. Proses menjatuhkan pilihan dan pemahaman serta tanggapan terhadap berbagai fenomena politik didasari oleh berbagai hal dan faktor sosial. Hal ini melibatkan dimensi kognisi dan juga dimensi afeksi berupa hal-hal yang bersifat emosional. Selain hal tersebut, terdapat dimensi evaluatif yang menjadi preferensi dalam bersikap selanjutnya.

Maka dari itu, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari perilaku politik perempuan dan hal-hal yang mendasari pilihan-pilihan politiknya, diajukan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk memperoleh keterangan yang mendetail dari informan yang diwawancarai. Pertanyaan yang diajukan adalah keikutsertaan memilih Pemilu 2009 lalu. Pertanyaan kedua adalah hal yang mendasari ketika menjatuhkan pilihan politiknya pada saat pemilihan. Disamping kedua pertanyaan utama tersebut, diajukan juga beberapa pertanyaan untuk mengontrol dan mengarahkan jawaban informan sehingga diperoleh informasi yang lebih spesifik. Dari hasil wawancara dan yang dilakukan selama dilapangan, maka ditemukan

beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan pada pemilihan anggota legislatif di Kecamatan Katoi antara lain :

1. Proses Sosialisasi

Proses sosialisasi merupakan proses transmisi nilai dalam suatu masyarakat tertentu dari generasi ke generasi yang berlangsung sepanjang waktu. Dalam proses sosialisasi, masyarakat memperoleh informasi, ide dan nilai-nilai yang menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh menjadi dasar dalam memberikan penilaian terhadap objek-objek politik. Informasi ini diterima oleh individu melalui media, keluarga dan lingkungan sosial dan menjadi dasar pengetahuan yang digunakan bagi masyarakat atau individu untuk menjatuhkan pilihan-pilihan politiknya.

Proses transmisi nilai-nilai yang diterima individu yang berasal dari keluarga, lingkungan pergaulan dan media massa. Nilai-nilai yang diserap oleh individu inilah yang kemudian membentuk persepsi seseorang terhadap fenomena politik. Proses sosialisasi juga membentuk predisposisi seseorang dalam menilai sesuatu.

Studi yang dilakukan di Kecamatan Katoi ini, menunjukkan bahwa lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi seseorang dalam membentuk pengetahuan-pengetahuan tertentu. Lingkungan sosial seperti keluarga, teman sepermainan, sekolah dan pekerjaan serta media massa berperan sangat besar dalam membentuk struktur pengetahuan dan preferensi seseorang untuk menjatuhkan pilihan politiknya.

Dalam penelitian ini, diajukan pertanyaan tentang sumber memperoleh pengetahuan tentang masalah politik dan bagaimana pengaruh pengetahuan tersebut terhadap pilihan politiknya. Dalam menjawab pertanyaan ini, sebagian besar informan mengatakan bahwa pengetahuan yang mereka miliki mereka tentang politik mereka dapatkan dari lingkungan

pergaulan seperti keluarga, teman, sekolah, pekerjaan, dan orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Disamping itu informan juga mengatakan memperoleh informasi dan pengetahuan tentang politik dari membaca koran, majalah, mendengarkan radio dan menonton televisi.

Ketika informan ditanya tentang pengaruh pengetahuan mengenai masalah-masalah politik dengan pilihan-pilihan politiknya, informan menjawab bahwa mereka kurang mendapatkan pengetahuan tentang tata cara memilih dan terutama tentang profil caleg dan partainya. Terutama partai-partai yang tidak populer, meskipun ada peran media massa seperti televisi, akan tetapi kecenderungan perempuan kurang memiliki perhatian pada masalah-masalah politik, kecuali perempuan pada kalangan-kalangan tertentu yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan memiliki aktivitas di wilayah publik. Arahan akan pilihan-pilihan politik akan cenderung lebih banyak mereka dapatkan dari keluarga, kelompok bergosip (teman sepergaulan) dan bahkan dari elit-elit kampung (kepala Desa, Dusun, RT/RW) yang secara tidak langsung memberikan afirmasinya pada seorang caleg ataupun partai-partai tertentu.

domestifikasi sosial atas peran-peran perempuan yang cenderung berkembang di kalangan perempuan kampung, justru cenderung membuat perempuan di Kecamatan Katoimalah rentan menjadi komodifikasi keluarga dalam transaksi politik Uang, yang dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki.

terlihat jelas bahwa lingkungan pergaulan, keluarga dan media memberi kontribusi yang cukup besar dalam membentuk pengetahuan seseorang terhadap informasi politik. Pada gilirannya, pengetahuan inilah yang digunakan untuk menjatuhkan pilihan politiknya. Jadi disini terlihat jelas peran lingkungan dan akses informasi dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang.

Salah seorang informan yang ditemui mengaku memperoleh informasi dari keluarganya tentang Partai Politik dan caleg-caleg yang akan dipilihnya,. Mirnawaty mengungkapkan :

“....Informasinya dari keluarga kalau pak Asis (Red: Salah Seorang caleg yang kini menjadi Anggota DPRD Kolaka Utara) itu lebih pantas untuk dipilih....” (wawancara tanggal 30 Desember 2010)

Informan tersebut adalah seorang Ibu Rumah Tangga. Ia menggambarkan bahwa suaminya pernah bertemu dengan Pak Asis di rumahnya pak dusun. Saat itu, suaminya dipanggil untuk menghadiri pertemuan, kebetulan pak dusun juga adalah keluarga, waktu itu sedang ada acara syukuran.

Kondisi yang dialami oleh ibu Mirnawaty di atas menggambarkan bahwa keluarga sangat berperan. Dalam proses sosialisasi yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, hal itu merupakan transmisi nilai-nilai yang dianut atau dimiliki dalam lingkungan keluarga. Dimana nilai-nilai tersebut diajarkan kepada anggota keluarga yang lain sehingga akan mempengaruhi struktur pengetahuan dalam memandang fenomena politik.

Hampir senada dengan Nur Azizah, salah seorang informan yang ditemui juga menerima banyak informasi dari lingkungan pergaulannya, Chaly yang seorang mahasiswa, banyak berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa serta orang-orang yang memiliki banyak informasi tentang proses partai Politik dan Caleg yang menjadi peserta Pemilu. Selain informasi dari teman-teman di lingkungannya, Chaly juga mengakses informasi dari berbagai media massa tentang partai-partai politik yang menjadi peserta Pemilu dan juga membaca buku-buku tentang politik. Chaly mengungkapkan:

“....Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa, kadang dengan dosen dan juga dengan orang-orang yang sering bersentuhan dengan politik, saya juga suka baca koran, nonton berita dan terkadang membaca buku....”(wawancara tanggal 5 Januari 2011)

Data yang diperoleh selama penelitian juga menunjukkan relasi yang kuat antara lingkungan pergaulan seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan dalam mempengaruhi pengetahuan seseorang terhadap fenomena politik. Kebanyakan informan dalam penelitian ini mengaku memperoleh pengetahuan tentang politik dari lingkungan keluarga dan pergaulan mereka. Pengetahuan-pengetahuan tersebut kebanyakan berupa pengetahuan tersebut terutama tentang caleg. Kebanyakan informasi tentang caleg banyak didapatkan justru dari mulut ke mulut dari sesama pergaulan di lingkungan masing-masing ketika mereka membicarakan (gosip) tentang pilihan-pilihan politik mereka sendiri ataupun pilihan orang tuanya ataupun suaminya.

Dari informan pula, didapatkan gambaran bahwa, mereka hanya lebih banyak mengetahui tentang partai politik dari media massa atau televisi. Pada hari-hari tertentu televisi akan menayangkan debat antar partai, dimana partai akan memaparkan visi dan misinya serta program-program, selain itu, di Harian Media Massa (Kendari Post) juga secara reguler memberikan ulasan mengenai profil tiap-tiap partai.

Kurangnya informasi tentang caleg dari media massa, tentunya terkait dengan kemampuan para caleg untuk mengakses media massa, sehingga untuk konteks komunitas/basis massa mereka akan lebih cenderung menggunakan instrumen-instrumen politik yang lebih menyentuh komunitas terutama melalui instrumen struktural kampung (kepala Desa, Kepala Dusun, RT/RW) ataupun hubungan-hubungan kekeluargaan yang diharapkan akan mampu memberikan dampak yang luas bagi keterpilihannya.

Ini menunjukkan bahwa korelasi lingkungan sosial dengan pilihan politik sangat erat, lingkungan pergaulan dalam hal ini berupa lingkungan tempat tinggal dan keluarga serta lingkungan pendidikan sangat berpengaruh dalam penyediaan informasi dan membentuk

pengetahuan-pengetahuan terhadap pilihan-pilihan politik. Pada sisi yang lain media massa juga menyediakan informasi cukup berperan akan tetapi kurang memberikan pengaruh. Proses sosialisasi yang berlangsung dalam lingkungan sosial membawa dampak pada terbentuknya persepsi seseorang terhadap objek-objek politik yang pada akhirnya berpengaruh pada pilihan politik. Terdapat hal yang sangat penting dalam proses sosialisasi ini, proses sosialisasi pada dasarnya menyediakan berbagai informasi untuk orang-orang yang berada dalam suatu komunitas.

(i). Akses Informasi

Tersedianya berbagai informasi dapat memudahkan seseorang untuk membentuk pengetahuan-pengetahuan tentang objek politik. Informasi-informasi yang diterima tentang pilkada dan pasangan kandidat akan memudahkan seseorang untuk melakukan penilaian yang akan berujung pada pilihan-pilihan politik. Akses informasi yang baik, akan membentuk pengetahuan yang berkesinambungan pula.

Dalam penelitian ini diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa penting informasi tentang politik serta proses pemilihan umum dan bagaimana upaya mendapatkan informasi tersebut. Sebagian besar informan menjawab bahwa informasi tentang Pemilihan Umum, Partai Politik dan Caleg kurang memadai sebab informasi tentang hal tersebut tidak terlalu penting dan menganggap informasi tersebut tidak terlalu berhubungan dengan dirinya dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kemungkinan perubahan kehidupan pribadinya maupun keluarganya.

Akses terhadap informasi adalah suatu proses yang berbeda-beda pada setiap perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Faktor lingkungan sosial juga menjadi hal yang sangat penting dalam menyediakan berbagai informasi. Terdapat lingkungan yang memudahkan

perempuan dalam mendapatkan informasi dan terdapat pula lingkungan yang membuat informan cukup sulit memperolehnya. Hal ini pun berkaitan dengan seberapa penting informasi bagi dirinya. Lingkungan sosial yang menganggap bahwa informasi tentang pemilihan Umum adalah sesuatu yang penting dan informasi tersebut adalah kebutuhan, maka informan yang berada dalam lingkungan ini akan berupaya untuk mengakses setiap perkembangan tentang pemilihan Umum

Bagi informan yang memiliki informasi yang minim, hal itu disebabkan oleh faktor dimana informasi politik bukan dianggap sebagai sesuatu yang mendatangkan hal akan mempengaruhi dan memberi perubahan bagi kehidupan sehari-harinya. Kebanyakan mereka berifat pasif pada informasi, disamping, memang ada ruang publik bagi mereka untuk mengakses informasi yang cukup tentang pemilu juga tidak ada.

Seperti hal ibu Dg.Bacce, yang sehari-harinya hanya bekerja di kebun dan di rumah mengurus rumah tangganya memang ikut memilih tapi tidak mengetahui lebih banyak tentang partai politik dan caleg yang dipilihnya waktu itu. Dia mengaku tidak dapat membaca dan menulis. Ibu Dg.Bacce juga tidak tahu nama-nama caleg yang dipilihnya. Informasi yang diterima berasal dari ketua RT di tempat tinggalnya, bahkan Ketua RT di tempat tinggalnya menganjurkan untuk memilih salah satu caleg waktu itu. Dengan aktivitasnya yang sangat terbatas pada kebun dan rumah tangga dari interkasinya sesama warga maupun ibu-ibu di tempat tinggalnya ia tidak pernah membicarakan tentang Politik. Ibu Dg.Bacce mengatakan:

“....Saya ikut memilih waktu itu tapi, saya tidak tahu namanya, saya juga kesulitan mencarinya. Ada fotonya, tapi saya tidak tahu. Pak RT kasih saya lihat fotonya, disuruh tusuk dia, tapi kudapat gambarnya partai yang warna kuning yang pohonnya rindang, jadi itu saja kutusuk.....” (Wawancara tanggal 29 Desember 2010)

Minimnya informasi yang dimiliki membuat ibu Dg.Bacce hanya mereferensikan pilihannya pada pilihan-pilihan lamanya yang telah biasa ia pilih. Proses ini, disebut sebagai proses Habitulasi, dimana memang jarang partai politik di Indonesia yang mampu mencapai tingkatan sosialisasi seperti ini. Yang dimaksud oleh Ibu Bacce di atas, barangkali adalah partai Golkar, Dominasi Golkar selama Orde Baru memang telah memberikan keuntungan tersendiri. Selain struktur yang mapan, masyarakat terutama pada pemilih-pemilih yang berumur tua dan pasif seperti ibu Dg.Bacce telah mengalami sosialisasi dan pembiasaan yang telah berlangsung lama. Untuk konteks seperti ini Para pemilih memang menyerap informasi tapi tapi tidak mencari dan mengolah informasi dengan aktif (Nursal, 2004:68). Hal ini berefek pada pilihannya pada ikut pemilu yang mudah untuk diarahkan. Ketika ia kesulitan mengidentifikasi apa yang diarahkan maka ia kemudian akan kembali preferensi lama yang menjadi pilihannya di masa lalu.

Pada wawancara yang lain, seorang mahasiswi yang merupakan mahasiswi Ilmu Keperawatan di Akademi Keperawatan Sandi Karsa mengungkapkan bahwa pilihan politik perempuan tergantung pada informasi yang dia terima. Untuk pilihan caleg dan partai, didasarkan pada informasi yang diterima tentang visi dan misinya maupun apa programnya. Berikut perikan wawancara dengan Suryani yang penulis temui di tempat kostnya di Makassar :

“...Pilihan politik perempuan tergantung pada informasi mengenai apa visi dan misinya serta ke depan apa yang akan dia lakukan sebagai bentuk pelaksanaan program kerjanya, informasi mengani hal itu yang akan dijadikan sebagai pertimbangannya untuk menetapkan pilihan pada partai yang mana caleg siapa yang akan ia pilih...”(wawancara tanggal 5 Januari 2011)

2. Kelompok Sosial

Secara sosiologis, masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok sosial yang dapat dikategorisasikan. Pengelompokan sosial ini sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan politik

masyarakat (Nursal, 2004:55) Proses sosialisasi yang berlangsung panjang membuat pemilih perempuan mengidentifikasikan dirinya berdasarkan kelompok sosialnya. Dalam kelompok-kelompok sosial seperti kelompok kategorial laki-laki dan perempuan, kelompok berdasarkan pekerjaan, status sosio ekonomi, kelompok etnis yang meliputi ras, agama dan daerah asal, setiap individu akan mengalami proses sosialisai berdasarkan kelompok sosialnya.

Salah seorang informan laki-laki yang bernama Erwin yang aktif di salah satu organisasi kemahasiswaan Daerah HIPERMAKU (Himpunan Mahasiswa Pelajar Kolaka Utara). Dia adalah pengurus komisariat Kecamatan Katoi. Dia juga sangat perhatian mengenai masalah-masalah gender, dalam kesempatan wawancara di Makassar, dia mengungkapkan:

“....Pilihan politik perempuan di kampung kita kecenderungannya mengikut kepada orang terdekatnya, entah itu bapaknya, kakaknya atau mungkin suaminya, atau kerabat lain yang mungkin memiliki jabatan atau dianggap sebagai tokoh di tempat tinggalnya. Hal ini karena perempuan lebih mungkin lebih percaya dengan orang terdekatnya....”(Wawancara Tanggal 10 Januari 2011))

Pendapat diatas menunjukkan, Keluarga diasumsikan sebagai kelompok sosial terkecil tapi intens dalam hal interaksi dan proses penerimaan informasi dan gagasan-gagasan. Seperti yang diungkapkan sebelumnya oleh Erwin, bahwa perempuan biasanya mengikut dengan pilihan politik orang-orang dekat yang berada di sekitarnya. Dalam kelompok sosial, melibatkan nilai-nilai yang terpahami oleh anggota kelompoknya. Sikap dan perilaku sebagai aksi dari pemahaman memiliki latar belakang dan konteks yang berbeda dengan anggota kelompok lainnya. Hal ini juga melibatkan proses-proses dan peristiwa historis yang bertautan dengan nilai-nilai dalam kelompok sosial tersebut. Pada dasarnya, proses sosialisasi dalam kelompok-kelompok sosial melibatkan proses transmisi nilai-nilai yang terpahami oleh kelompok tersebut terhadap anggotanya. Jadi pilihan politik perempuan biasanya akan sangat terpengaruh dengan

proses sosialisasi dan perolehan pengetahuan dari kelompoknya, dan itu sangat berkaitan dengan dimensi psikologis pemilih perempuan.

3. Kepentingan

Dalam menjatuhkan pilihan politik, faktor kepentingan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh. Umumnya informan mengungkapkan bahwa hal yang mempengaruhi pilihan politiknya adalah faktor kepentingan. Ini menjadi sangat beralasan sebab pemilih perempuan akan lebih memilih sesuatu yang paling dekat dengan apa yang dibutuhkan dan realistis dalam menjatuhkan pilihan politiknya.

Salah seorang informan laki-laki yang bernama Abu Daud Ahmad yang juga seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu Universitas di Makassar mengungkapkan

“....kepentingan politik perempuan lebih cenderung terlihat pada aspek-aspek ekonomi, sebab merekalah yang sehari-hari bersentuhan dengan fluktuasi harga dan supply bahan kebutuhan pokok. Kaum perempuan adalah pengguna dan pengalokasi dana yang paling efisien. Maka situasi ekonomi akan sangat mempengaruhi kehidupan mereka, maka politik dan ekonomi bagi kaum perempuan sangat tidak terpisah....” (wawancara tanggal 10 Januari 2011)

Pendapat diatas bagi penulis wajar-wajar saja. Akan tetapi mendekatkan kepentingan perempuan pada ekonomi seolah – olah men-*stereotype*-kan perempuan. Perilaku ekonomi efisien kaum perempuan juga memberi keuntungan bagi kaum laki-laki. Karenanya juga pada dasarnya asumsi ini adalah komodifikasi kepentingan laki-laki terhadap perempuan, yang jika para caleg jeli melihat faktor kepentingan ini, tidak hanya akan mendapatkan dukungan dari pemilih laki-laki akan tetapi juga akan banyak mendapatkan dukungan dari kaum perempuan.

Di atas semua ini, kepentingan dasar bagi perempuan yang banyak dijadikan sebagai argumentasi para aktivis feminis masuk dalam ranah politik adalah, bahwa kebijakan pemerintah dalam pembangunan sangat ber-*mainstream* laki-laki. Kebutuhan-kebutuhan dasar pada sarana dan prasarana publik justru menanggalkan kepentingan dasar perempuan. Hal itu itu tersebar

hampir di semua sektor. Terutama di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, tenaga kerja, dsb

Ambillah satu contoh di bidang ke-tenaga kerja-an, perempuan adalah tenaga kerja dengan SDM yang banyak akan tetapi kurang terlatih, dan tidak berpendidikan. Akhirnya mereka terjebak pada ruang-ruang kerja dimana mereka menjadi tenaga kerja yang sangat murah. Di bidang pertanian, hampir dalam semua proses, mulai dari penanaman, panen, penyimpanan hingga pemanfaatan produksi hampir dijalani oleh perempuan. Akan tetapi komodifikasi pasar atas komoditas pertanian sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Sehingga perempuan sebagai pekerja mendapatkan pendapatan yang rendah dari semua proses tersebut.

Salah seorang informan yang diwawancarai mengaku bahwa pilihan politiknya sangat dipengaruhi oleh kepentingannya. Isu-isu seputar masalah ekonomi, perbaikan taraf hidup menjadi hal-hal yang prioritas dan menjadi pertimbangan pemilih perempuan. Faktor kepentingan, membuat pemilih perempuan bisa mempertimbangkan untung rugi dari pilihan politiknya. Dalam penelitian ini kepentingan informan terhadap para caleg yang maju pada pemilihan legislatif tahun 2009 merupakan kepentingan yang mengarah pada hal-hal yang inklusif. Dalam artian bahwa kepentingan tersebut tidak mengarah kepada kepentingannya sendiri, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan masyarakat luas.

Seorang informan yang berlatar belakang sebagai pegawai Bank Swasta yang diwawancarai mengungkapkan bahwa pilihannya terhadap salah seorang caleg didasarkan atas janjinya untuk memperjuangkan perbaikan sarana jalan dan memperjuangkan untuk didirikannya sekolah SMK negeri di Kecamatan Katoi. Menurutnya bahwa sarana jalan yang bagus akan memobilisasi komoditas-komoditas pertanian di wilayah ini, dan keberadaan sekolah SMK akan menjadi ruang dimana anak-anak usia sekolah sejak dini telah diberikan sekolah keterampilan

kerja yang memadai, apalagi di daerah ini adalah daerah pertanian dan perkebunan, semoga ke depan SMK ini adalah penunjang dari aspek pertanian di wilayah ini. Kepentingan utama saya dari adanya jalan yang bagus, tentu adalah peningkatan taraf ekonomi dengan lancarnya barang keluar dan masuk wilayah ini akan memacu pertumbuhan, selain itu akan memarakkan investasi, baik lokal, domestik maupun luar daerah sehingga pinjaman/kredit perbankan yang ditanganinya menjadi berkembang dan lancar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perilaku politik perempuan merupakan suatu produk sosial yang tidak hadir dengan begitu saja. Terdapat faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku dan pilihan politik perempuan. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini kami dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perempuan menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan informasi yang dia terima, dimana pilihan politik ini juga ternyata berkorelasi dengan kondisi lingkungan dimana perempuan itu tinggal. Hal ini membuat pilihan politik tiap perempuan berbeda-beda. Terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh tentang profil partai, figur caleg, serta visi dan misinya, akan tetapi juga terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya meski dengan pengetahuan yang sangat minim tentang partai, caleg dan juga visi dan misinya.
2. Terdapat pula pemilih perempuan yang memiliki pengetahuan dan informasi tentang proses Pemilu Legislatif, tetapi dari berbagai informasi yang diterima pemilih perempuan tersebut tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini karena adanya anggapan bahwa proses politik yang ada tidak mampu meyakinkannya bahwa akan ada perubahan yang lebih baik.

Perilaku politik terbentuk melalui sosialisasi dan berbagai informasi yang diterima dan dikelola dalam lingkungan sosial pemilih perempuan. Informasi-informasi yang ada akan

membentuk bangunan Kognitif pemilih perempuan dan yang nantinya akan mendorongnya untuk memberikan afirmasi pada pilihan politiknya.

Hasil penelitian penulis dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan, yakni ; Proses Sosialisasi, Kelompok Sosial, faktor Kepentingan politik.

1. Pada faktor Informasi, pemilih perempuan kurang mendapatkan pengetahuan tentang tata cara memilih dan terutama tentang profil caleg dan partainya. Terutama partai-partai yang tidak populer, meskipun ada peran media massa seperti televisi, akan tetapi kecenderungan perempuan kurang memiliki perhatian pada masalah-masalah politik, kecuali perempuan pada kalangan-kalangan tertentu yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan memiliki aktivitas di wilayah publik. Arahkan akan pilihan-pilihan politik akan cenderung lebih banyak mereka dapatkan dari keluarga, kelompok bergosip (teman sepergaulan) dan bahkan dari elit-elit kampung (kepala Desa, Dusun, RT/RW) yang secara tidak langsung memberikan afirmasinya pada seorang caleg ataupun partai-partai tertentu.
2. Kelompok sosial, perempuan biasanya mengikut dengan pilihan politik orang-orang dekat yang berada di sekitarnya. Dalam kelompok sosial, melibatkan nilai-nilai yang terpahami oleh anggota kelompoknya. Sikap dan perilaku sebagai aksi dari pemahaman memiliki latar belakang dan konteks yang berbeda dengan anggota kelompok lainnya. Hal ini juga melibatkan proses-proses dan peristiwa historis yang bertautan dengan nilai-nilai dalam kelompok sosial tersebut. Pada dasarnya, proses sosialisasi dalam kelompok-kelompok sosial melibatkan proses transmisi nilai-nilai yang terpahami oleh kelompok tersebut terhadap anggotanya. Jadi pilihan politik perempuan biasanya akan sangat terpengaruh dengan proses sosialisasi dan perolehan pengetahuan dari kelompoknya, dan itu sangat berkaitan dengan dimensi psikologis pemilih perempuan.

3. Faktor Kepentingan, kepentingan perempuan pada Pemilu Legislatif lebih banyak isu-isu seputar masalah ekonomi dan perbaikan taraf hidup menjadi hal-hal yang prioritas dan menjadi pertimbangan pemilih perempuan. Untuk saat ini, isu-isu perbaikan taraf hidup lebih merupakan aspek yang terdekat dengan kehidupan sehari-hari perempuan yang lebih banyak berada pada ruang – ruang domestik dimana rendahnya pendapatan dan rendahnya tingkat kesejahteraan kaum perempuan harus mengelola kebutuhan rumah tangga secara efisien.

B. Saran

Pemilihan Umum tahun 2009 adalah pemilihan Umum demokratis yang dilakukan bangsa ini untuk ke tiga kalinya sejak reformasi 1998 bergulir. Harus diakui masih banyak kekurangan. Pemilu masih dipandang secara pesimistis oleh banyak kalangan karena dianggap belum mampu memberikan perubahan apa-apa terutama dalam peningkatan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat. Pemilu Legislatif, meski telah berlangsung dengan suara terbanyak dalam menentukan siapa-siapa caleg yang akan menduduki kursi legislatif, namun prosesnya masih sangat konvensional. Pemilih kita masih banyak terjebak pada habituasi pilihan-pilihan lamanya terutama bagi pemilih perempuan apalagi pemilih perempuan yang berdomisili di daerah/wilayah pinggiran.

Mengingat perempuan sebagai pemilih terbesar di wilayah Kato, maka sudah saatnya Partai Politik, maupun para elit politik perlu mempertimbangkan perempuan sebagai segmen pemilih yang strategis, yang kepentingan-kepentingan serta aspirasi mereka perlu untuk diakomodasi dan dikelola lebih baik. Mengakomodasi isu-isu yang dekat dengan masalah keperempuanan memungkinkan partai ataupun caleg untuk dapat menduduki kursi dewan pada periode berikutnya.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa hal perlu untuk dilakukan, sebagai saran penulis yakni :

1. Peningkatan akses informasi dan perluasan informasi mengenai proses Pemilu Legislatif secara sistematis perlu dilakukan untuk mampu menjangkau pemilih-pemilih perempuan yang berada di daerah pinggiran dan dari berbagai kalangan dan lapisan social. Baik sosialisasi melalui media cetak, audio atau audio visual, semina-seminar politik serta penyuluhan politik.
2. Mengingat pemilih perempuan berasal dari kondisi sosial yang berbeda-beda, dengan tingkat pendidikan yang tidak sama dan hal ini sangat berkorelasi dengan akses informasi terhadap proses politik, maka seyogyanya pemerintah maupun pihak-pihak seperti LSM dapat memberikan bentuk pendidikan politik yang bersifat menyeluruh dan persuasif, sehingga pemilih perempuan dapat mengetahui proses politik dengan lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis, Dr. 2006. *Feminisme: Sebuah kata Hati*. Jakarta: Kompas
- Asfar, M. 2004. *Pemilu dan Prilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Azwar Saifuddin, MA. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiarjo, Miriam, Prof. 1995. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Fakih, Mansor, Dr. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, Prasetya, Dr. 2004. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi UI
- Mashod, Mohtar dan Nasikun. 1987. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: PAU- Studi UGM
- Mubarok, Mufti. 2005. *Sukses Pilkada*. Surabaya: PT. Jaya Pustaka Media Utama
- Nursal, Adman, 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media
- S Salossa, Daniel. 2005. *Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Media Presindo
- Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang:
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Uhlen, Andres. 1998. *Oposisi Berserak*. Bandung: Mizan

Jurnal

- Surbakti, Ramlan. 2002. *"Identifikasi Partai Politik bagi Kaum Perempuan"*, dalam Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Jakarta: LabSospol FISIP UNAS

Artikel

- Azza Karam dalam kajian bulanan Lingkaran Survei Indonesia, edisi 01 Maret 2007

Daftar nama informan

Nama informan	Kapasitas dan kegiatan	Pend. terakhir
Nur Jannah	LSM	Strata 1
Rosdiana	LSM	D3
Asma Ulmi	Pengurus Parpol	Strata 1
Rasni Rala	Profesional	D3
Yelni Febriani	Mahasiswa	SMU
Ibu Dg.Bacce	Petani/Ibu RT	Tidak Tamat SD
Ibu Idha	Ibu RT	SMU
Mirnawaty	Ibu RT	SMU
Chaly	Ibu RT	S1
Suryani	Mahasiswa/Pengurus HIPERMAKU	SMU
Erwin	Mahasiswa/Pengurus HIPERMAKU	SMU
Abu Daud Ahmad	Mahasiswa	SMU